

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 63 disebutkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kehutanan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan, selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas pada sekretariat dinas, bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang kesepuluh yaitu "Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana".

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan : a) Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun, b) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan dan penyajian laporan keuangan , c) Bagan Akun Standar untuk Daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan Laporan Keuangan secara lengkap.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2022, tujuan pembangunan di bidang kehutanan yang ingin dicapai dalam tahun 2022 adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, mempercepat penurunan angka kemiskinan serta memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2022 yang juga merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkurangnya tekanan kerusakan hutan melalui konservasi dan perlindungan sumber daya hutan guna menunjang adaptasi perubahan iklim, perbaikan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat dan perencanaan dan pengembangan kehutanan yang dinamis, terarah dan terpadu di provinsi Sumatera Barat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2022 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang pendapatan dalam tahun 2022 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem pendapatan.
- Peningkatan pendapatan melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 5 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat 19 kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Adapun pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

I. Pencapaian Target Kinerja Program

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
1	3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (100%)
2	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan (61,41 Indeks)
3	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Fasilitasi Kawasan Hutan yang Dikonservasi (100%)
4	3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (50.000 Ha)
5	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Jumlah DAS yang difasilitasi (3 DAS)

II. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
1	3.28.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 85%
2	3.28.01.1.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan selama 1 Tahun
3	3.28.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum
4	3.28.01.1.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan dan kompetensi ASN sebesar 60%
5	3.28.01.1.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum
6	3.28.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum
8	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
9	3.28.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)
10	3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	Menurunnya kerusakan hutan di hutan lindung dan hutan produksi (15%)
11	3.28.03.1.04.	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	Menurunnya luas lahan kritis (0,04%)
12	3.28.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)
13	3.28.03.1.02	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)
14	3.28.03.1.03	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan (80%)
15	3.28.03.1.06	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk)	Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu (85%)
16	3.28.03.1.07	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu (85%)
17	3.28.04.1.03.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksanannya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH (10 KPH)
18	3.28.05.1.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial (10) KPH
19	3.28.06.1.01.	Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksanannya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH (10 KPH)

III. Pencapaian Target Kinerja Sub Kegiatan

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
		1.SEKRETARIAT	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen DPA SKPD, Dokumen Perubahan DPA SKPD, Dokumen RKA SKPD, Dokumen Renstra dan Renja dan Dokumen Perubahan RKA yang disusun
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan sebanyak 4 dokumen
3	3.28.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN dishut yang dibayarkan dalam 1 tahun
4	3.28.01.1.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi pengelola keuangan dan jasa administrasi PTT dalam 1 tahun
5	3.28.01.1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
6	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disiapkan
7	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset gedung dan kendaraan dinas operasional
8	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
9	3.28.01.1.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur sipil negara dishut yang mengikuti BIMTEK (450 orang)
10	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 1 tahun
11	3.28.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 tahun
12	3.28.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis yang disediakan, makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu
13	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan selama 1 tahun
14	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang disediakan
15	3.28.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun
16	3.28.01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeleur yang diadakan selama 1 tahun
17	3.28.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan
18	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belnja air, internet, telepon, listrik yang terbayarkan selama 1 tahun
19	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor PTT, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Kesehatan Jasmani, Jasa Kesehatan Rohani, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa Sopir Kantor selama 1 tahun
20	3.28.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional, kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
21	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa balik nama kendaraan, jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional serta kendaraan dinas yang dipelihara
22	3.28.01.1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Gedung kantor dan rumah dinas yang

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
		Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	terpelihara selama 1 tahun
		2. BIDANG PPMHA	
1	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya (250 orang), Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan (10 Unit) dan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara (10 Unit)
2	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi (100 Kelompok)
3	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum (100 Orang), Jumlah Fasilitasi pengembangan Usaha (3 Kelompok), Jumlah Fasilitasi Kewirausahaan (5 Kali), Jumlah Stup Lebah Madu Itama (220 Stup), Jumlah Unit Ekonomi Produktif dan Sarpras Ekowisata yang Difasilitasi (3 Unit), Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi (DAK) dan Jumlah Usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok)
		3. BIDANG PHKSDAE	
1	3.28.03.1.01.03.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional KPH yang tersedia dan terpelihara (10 KPH)
2	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutan yang tertangani (5 kasus), Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (160 kali), Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan (1 Peta) dan Jumlah Satgas LMPHBN (450 Orang)
3	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan (20 Kali)
4	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi (150 Orang) dan Jumlah Patroli, Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH (150 Kali)
5	3.28.04.1.03.05.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan (10 Kali)
6	3.28.04.1.03.06.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting di kewenangan daerah Provinsi yang dikelola (4 Kali)
		4. BIDANG PDASRHL	

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
1	3.28.03.1.04.01.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun (1 Dokumen)
2	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun (300 Ha)
3	3.28.03.1.04.08.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 (1 Dokumen) dan Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL
4	3.28.06.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen DAS yang tersusun (1 Dokumen)
5	3.28.06.1.01.02.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terre-enumerasi (10 Petak) dan Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun (10 KPH)
6	3.28.06.1.01.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan (2 Kelompok)
7	3.28.06.1.01.05.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Kajian Pengelolaan DAS (1 Dokumen)
5. BIDANG PRPH			
1	3.28.03.1.01.02.	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang penataan blok/pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana (10 KM)
2	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (12 Dokumen)
3	3.28.03.1.03.02.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia (1 Dokumen)
4	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi (27 Unit) dan Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBP) (10 KPH)
5	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi (20 Unit) dan Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBP) (10 KPH)
6	3.28.03.1.03.06.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Produksi yang dinilai (3 Dokumen)
7	3.28.03.1.03.07.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Lindung yang dinilai (7 Dokumen)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
8	3.28.03.1.03.08.	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan (10 Kelompok)
9	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (10 Komoditi/Produk) dan Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (10 Unit)
10	3.28.03.1.06.04.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali (20 Unit)
11	3.28.03.1.07.02.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun yang terkendali (40 Unit)
		6. UPTD BSPTH	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah
4	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen-komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan
5	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Amplop, kop surat, kwitansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen)
6	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
7	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan
8	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia
9	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab / bangunan lainnya yang dipelihara
10	3.28.03.1.04.06.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Arboretum untuk Pelestarian Sumber Daya Genetik (1 Unit), Jumlah Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang Terbangun (12 Unit) dan Jumlah Unit Perbenihan yang dikembangkan (1 Unit)
11	3.28.03.1.09.01.	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pengekar Benih dan/atau Bibit (6 Unit)
12	3.28.03.1.09.02.	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih (2 Sertifikat)
13	3.28.03.1.09.03.	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikasi Mutu Benih (5 Sertifikat)
14	3.28.03.1.09.04.	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikasi Mutu Bibit (10 Sertifikat)
15	3.28.03.1.09.05.	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengawasan peredaran peredaran benih dan/atau bibit (7 Unit)
		7. UPTD KPHL PASAMAN RAYA	

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD, perubahan RKA SKPD, dokumen DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (4 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disiapkan (12 Dokumen)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (64 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Unit)
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (amplop, kop surat, kwintansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen) (1 Set)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Buah)
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet, TV kabel yang dibayarkan (12 Bulan), Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan (1 Rekening), Jumlah tagihan air yang dibayarkan (520 m3) dan Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan (16440 Kwh)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (6 Orang)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor UPTD dan Resort yang terpelihara (2 Unit)
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang UPTD KPH (DBH DR) (1 Dokumen) dan Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka pendek panjang UPTD KPH (DBH DR) (1 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah perizinan berusaha di bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada kawasan hutan produksi (3 Unit)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah perizinan berusaha di bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada kawasan hutan lindung (6 Unit)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/atau produk yang dikembangkan (1 Komoditi) dan Jumlah sarana dan prasarana ekowisata yang terfasilitasi (1 Unit)
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Terbangun (225 Ha)
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (DBH-DR) (16 Kali) dan Jumlah Satgas LMPHBN (60 Orang)

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan (DBH-DR) (2 Kali), Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan (DBH-DR) (2 Kali) dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan (DBH-DR) (4 Kali)
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli, Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah Kelola KPH (DBH-DR) (15 Kali)
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Budidaya Tanaman Unggulan Lokal dan Produktif (5 Ha)
21	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara (1 Unit)
22	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Terfasilitasi (10 Kelompok)
23	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Fasilitas Kewirausahaan (5 Kali), Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha (3 Kelompok), Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi (40 Kelompok), Jumlah Stup Madu Itama (220 Stup), Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi (DAK) (3 Unit), Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi (600 Stup) dan Jumlah Usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok)
8. UPTD KPHL LIMAPLUH KOTA			
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA dan Perubahan DPA SKPD yang disusun (2 Dokumen) dan Jumlah dokumen RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (18 Dokumen)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit yang dilakukan penjagaan (1 Unit)
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Batik) (37 Stel) dan Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (PDH) (37 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (1 Unit)
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (1 Unit)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (24 Eksemplar)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas Tagihan Internet yang Dibayarkan (12 Mbps) dan Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang Dibayarkan (8000 KVA)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (3 Orang)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab/bangunannya yang dipelihara (1 Unit)
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Dokumen Revisi RPHJP KPHL Lima Puluh Kota tahun 2014-2023 (1 Dokumen) dan Dokumen RPHJP di Lima Puluh Kota tahun 2023 (1 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Wilayah Kelola Perhutanan Sosial yang Termonitor pada Kawasan Hutan Produksi (5 Unit)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Wilayah Kelola Perhutanan Sosial yang Termonitor pada Kawasan Hutan Lindung (22 Unit)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (1 Komoditi) dan Tersedianya Sarpras Ekowisata (1 Paket)
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab/P0 (DAK) (538 Ha), Luas hutan rakyat terbangun/rehab/P1 (DBH-DR) (25 Ha) dan Luas hutan rakyat yang terbangun/direhab/P1 (PAD) (50 Ha)
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani (2 Kasus), Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (17 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (8 Kali)
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (4 Kali), Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi (100 Orang) dan Jumlah patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Budidaya Tanaman Unggulan Lokal dan Produktif
21	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan (1 Unit)
22	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi (3 Kelompok)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
23	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum (100 Orang), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (20 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kali), Jumlah stup lebah madu yang disediakan (274 Stup), Jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (4 Unit) dan Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok)
		9. UPTD KPHL AGAM RAYA	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (42 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan (12 Bulan)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Buah)
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (1200 mbps), Jumlah tagihan Air (PDAM) dan Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (12000 Kwh)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia (3 Orang)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap (1 Unit)
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rancang bangunan tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun (2 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dikoordinasikan/dikendalikan (1 Izin usaha/kerjasama)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan (1 KPH)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Ekowisata pada wilayah KPH (3 Unit) dan Jumlah Unit Pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
			Komoditi)
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat diluar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P0) (125 ha), Luas hutan rakyat diluar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P1) (50 ha) dan Luas hutan rakyat diluar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P2) (105 ha)
17	3.28.03.1.04.06.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Januari sampai Desember (1 Unit)
18	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (18 Kali) dan Jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (50 Orang)
19	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (5 Kali)
20	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan /penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan (12 Kali)
21	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5 Ha)
22	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah stup lebah madu yang disediakan (172 Stup), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (7 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (1 Unit) dan Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (3 Kelompok)
		10. UPTD KPHL BUKIT BARISAN	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (2 Dokume)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hororarium pengurus / Penyimpan BMD (12 Bulan)
4	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (96 Stel)
5	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)
6	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (12 Bulan)
7	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis)
8	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air (1 Tahun), Internet (1 Tahun), Listrik (1 Tahun) dan Telepon (1 Tahun)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
9	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kesehatan Jasmani (12 Bulan), Jasa Rohaniawan (12 Bulan), Jasa Tenaga Administrasi Non ASN (12 Bulan), Jasa Tenaga Keamanan (13 Bulan) Jasa Tenaga Kebersihan (13 Bulan) dan Jasa Tenaga Supir Kantor (13 Bulan)
10	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara (3 Unit)
11	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)
12	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi yang dikoordinasikan/dikendalikan (4 Izin usaha/kerjasama)
13	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan (4 Izin usaha/kerjasama)
14	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dikembangkan (5 Unit)
15	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat Diluar Kawasan Hutan yang dibangun/direhab
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan kawasan Hutan yang dilakukan dan Jumlah Satgas LMPHBN
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan /penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 ha)
20	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan
21	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Terfasilitasi
22	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi dan Jumlah stup lebah madu yang disediakan
		11. UPTD KPHL SIJUNJUNG	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset gedung dan kendaraan dinas operasional
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (26 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Unit)
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan (1 Set)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (1 Buah)
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (12 Bulan), Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan (667 M3) dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (25904.4 Kwh)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kesehatan jasmani (6 Kali), Jumlah tenaga kebersihan kantor (1 Orang), Jumlah tenaga kesehatan rohani (wirid bulanan) (12 Kali), Jumlah tenaga pengaman kantor (1 Orang) dan Jumlah tenaga sopir kantor (1 Orang)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (2 Unit)
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang dikoodinasikan/dikendalikan (2 Unit)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dikoodinasikan/dikendalikan (2 Unit)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit pemanfaatan hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan yang dikembangkan (1 Komoditi)
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat Diluar Kawasan Hutan yang dibangun/direhab (50 Ha)
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan kawasan Hutan yang dilakukan (16 Kali) dan Jumlah Satgas LMPHBN (45 Orang)
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan yang dilaksanakan (2 Kali)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi fasilitas Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan (15 Kali)
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (Tanaman unggulan kayu putih) (1 Unit)
21	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan yang dilaksanakan (Pembuatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan) (2 Unit)
22	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah fasilitas kewirausahaan (5 Kali), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah stup lebah trigona (300 Stup), Jumlah usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok) dan Luas wilayah Perhutanan Sosial yang dikembangkan (2800 Ha)
12. UPTD KPHL SOLOK			
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun (1 Dokumen), Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (1 Dokumen), Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun (1 Dokumen) dan Jumlah RKA SKPD yang disusun (1 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (70 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan (12 Bulan)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Jenis)
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (1200 Mbps), Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan (420 meter kubik), dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (8000 Kwh)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia (3 Orang)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/rehab (1 Unit)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 Izin usaha / kerjasama)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (2 Izin usaha / kerjasama)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah sarana prasarana ekowisata pada wilayah KPH (2 KPH) dan Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (3 Unit)
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ipemeliharaan Hutan Rakyat Tahun 1 (P1) (150 Ha) dan Penanaman Hutan Rakyat (P0) (48 Ha)
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (10 Kali)
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan (15 Kali)
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5 Ha)
21	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah Usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok), Jumlah fasilitasi kewirausahaan (5 Kelompok), Jumlah stup madu ItaMa (200 Unit) dan Jumlah stup lebah madu Torasika (100 Unit)
		13. UPTD KPHL HULU BATANGHARI	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (40 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (12 Bulan)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Jenis)
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (100 Mbps), Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayar (480 M3) dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (5992.357333 Kwh)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Instruktur Kesehatan Jasmani / Instruktur Senam (12 Kegiatan), Jasa Kebersihan Kantor (13 Bulan), Pengamanan Kantor (13 Bulan) dan Jasa Sopir Kantor (13 Bulan)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor UPTD KPHL Hulu Batangharu yang diperlihara (1 Unit)
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RHJP) yang direvisi dan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RHJPd) yang disusun (1 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerja sama pemanfaatan dikawasan hutan produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (4 Izin usaha)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha kerjasama pemanfaatan dikawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan yang Dikembangkan (2 Unit)
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari (15 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan di Wilayah KPHL Hulu Batang Hari (30 Orang)
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitaasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (3 Kali)
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari (15 Kali)
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5.5 Ha)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
21	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti form (60 Orang) Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (2 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kali), Jumlah stup lebah madu yang disediakan (160 Stup), Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (2 Kelompok) dan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan (3650 Ha)
14. UPTD KPHP DHARMASRAYA			
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disiapkan
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (amplop, kop surat, kwintansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang disediakan
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air, internet, telepon, listrik yang terbayarkan selama 1 tahun
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (2 Izin usaha / Kerjasama)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 KPH)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1 Unit)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani (2 Kasus), Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali), Jumlah peta rawan kerusakan hutan yang tersedia (1 Peta) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (5 Kali)
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi (15 Orang) dan Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas hasil hutan bukan kayu dibudidayakan (5 Hektar)
20	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti form (85 Orang), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (4 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (4 Kali), Jumlah stup lebah madu yang disediakan (165 Stup), Jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (2 Unit) dan Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (3000 Hektar)
15. UPTD KPHP PESIRIS SELATAN			
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang disiapkan (12 Bulan)
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengurus / penyimpan BMD yang disediakan (12 Bulan) dan Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun (2 Dokumen)
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (42 Stel)
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Set)
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan (1 Set)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (12 Bulan)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (100 Mbps), Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan (9468 Kwh) dan Jumlah tagihan PDAM yang dibayarkan (668 M3)
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kesehatan rohani (wirid mingguan / bulanan / program ramadhan) (10 Kegiatan), Jumlah tenaga kebersihan kantor (1 Orang), Jumlah tenaga pengaman kantor (1 Orang) dan Jumlah tenaga sopir kantor (1 Orang)
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor (Resort) yang dipelihara (2 Unit)
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPTD KPHP Pesisir Selatan (1 Dokumen) dan Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPHP Pesisir Selatan (1 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (5 Izin usaha / Kerjasama)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 Izin usaha / Kerjasama)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (4 Unit)
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas pengijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara yang dibangun / direhab (15 Hektar) dan Luas penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara yang dibangun / direhab (50 Hektar)
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali)
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5 Ha)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
21	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Pesisir Selatan Wilayah Kelola KPHP Pesisir Selatan (1 Kelompok), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah Stup Lebah Madu Itama (265 Unit), Jumlah usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok) dan Stup Lebah Lokasi di Kambang Timut Kab. Pesisir Selatan sebanyak 25 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu (50 Unit)
		16. UPTD KPHP MENTAWAI	
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disiapkan
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengelola barang milik daerah
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen-komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (amplop, kop surat, kwintansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen)
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang disediakan
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belnja air, internet, telepon, listrik yang terbayarkan selama 1 tahun
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap
12	3.28.03.1.02.01	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (1 Dokumen)
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 Izin Usaha / Kerjasama)
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 KPH)
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1 Unit)

No	Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja/ Sasaran Kinerja
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan yang dilakukan (16 Kali)
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali)
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha)
20	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok) dan Jumlah stup lebah madu yang disediakan (165 Stup)

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2022, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp.100.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah, realisasi sebesar Rp.56.164.364,00 jumlah tersebut mencapai 56,16%.

Sedangkan alokasi belanja daerah untuk SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp.87.451.095.660,00 dengan realisasi sebesar Rp.80.415.328.501,52 jumlah realisasi tersebut mencapai 91,95% dengan rincian sebagai berikut :

•	Belanja Pegawai	Rp	37.813.865.843,00
•	Belanja Barang dan Jasa	Rp	41.021.174.946,52
•	Belanja Hibah	Rp	-
•	Belanja Modal	Rp	1.580.287.712,00
	Jumlah	Rp	80.415.328.501,52

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.56.164.364,00 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas) sebesar Rp.56.164.364,00

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2022 jika dibanding dengan anggaran tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	56.164.364,00	56,16	(43.835.636,00)
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-		-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	56.164.364,00	56,16	(43.835.636,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-		-
4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-		-

Pada tabel di atas terlihat jumlah realisasi kurang dari anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp.56.164.364,00 (56,16%) atau kurang sebesar Rp.43.835.636,00 (43,84%) dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

3.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/ KURANG
B	BELANJA LRA	87.451.095.660,00	80.415.328.501,52	91,95	7.035.767.158,48
I	BELANJA OPERASI	85.825.528.546,00	78.835.040.789,52	91,86	6.990.487.756,48
1	Belanja Pegawai	40.009.233.563,00	37.813.865.843,00	94,51	2.195.367.720,00
2	Belanja Barang dan Jasa	45.816.294.983,00	41.021.174.946,52	89,53	3.055.983.045,00
II	BELANJA MODAL	1.625.567.114,00	1.580.287.712,00	97,21	45.279.402,00
1	Belanja Peralatan dan Mesin	1.386.200.250,00	1.341.620.819,00	96,78	44.579.431,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	236.276.864,00	235.576.893,00	99,70	699.971,00
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00	-

Seluruh realisasi belanja setelah konversi pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setelah perubahan sebesar Rp.80.415.328.501,52 dengan persentase sebesar 91,95% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang terdiri dari 5 Program mencapai realisasi kinerja secara keseluruhan sebesar Rp.80.415.328.501,52 (91,95%).

Ikhtisar pencapaian realisasi keuangan menurut program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. REALISASI KEUANGAN PER PROGRAM

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
1	3.28.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.313.522.230,00	47.552.700.626,00	94,51	100,00	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (100%)	
2	3.28.03.	Program Pengelolaan Hutan	23.252.624.460,00	19.951.366.168,52	85,80	100,00	Indeks Tutupan Hutan (61,41 Indeks)	
3	3.28.04.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	225.402.500,00	176.497.502,00	78,30	100,00	Fasilitasi Kawasan Hutan yang Dikonservasi (100%)	
4	3.28.05.	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	13.109.546.470,00	12.223.583.597,00	93,24	100,00	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (50.000 Ha)	
5	3.28.06.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	550.000.000,00	511.180.608,00	92,94	100,00	Jumlah DAS yang difasilitasi (3 DAS)	
J U M L A H			87.451.095.660,00	80.415.328.501,52	91,95	100,00		

II. REALISASI KEUANGAN PER KEGIATAN

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
1	3.28.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	838.817.077,00	783.881.342,00	93,45	100,00	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sebesar 85%	
2	3.28.01.1.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.277.425.063,00	38.067.465.493,00	94,51	100,00	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan selama 1 Tahun	
3	3.28.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	559.487.320,00	480.391.474,00	85,86	100,00	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	
4	3.28.01.1.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	832.495.000,00	796.589.003,00	95,69	100,00	Meningkatnya kepatuhan dan kompetensi ASN sebesar 60%	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
5	3.28.01.1.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.599.014.768,00	1.555.252.784,00	97,26	100,00	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	
6	3.28.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.000.000,00	399.912.668,00	95,22	100,00	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
7	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.103.771.278,00	2.849.586.670,00	91,81	100,00	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	
8	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.682.511.724,00	2.619.621.192,00	97,66	100,00	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	
9	3.28.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Kewenangan Provinsi	300.000.000,00	297.079.026,00	99,03	100,00	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)	
10	3.28.03.1.02	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	547.930.560,00	509.700.275,00	93,02	100,00	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)	
11	3.28.03.1.03	Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	4.327.485.300,00	4.223.320.617,52	97,59	100,00	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan (80%)	
12	3.28.03.1.04.	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	12.937.902.600,00	9.956.400.693,00	76,96	100,00	Menurunnya luas lahan kritis (0,04%)	
13	3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	4.034.580.000,00	3.931.453.332,00	97,44	100,00	Menurunnya kerusakan hutan di hutan lindung dan hutan produksi (15%)	
14	3.28.03.1.06	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk)	699.625.000,00	683.192.500,00	97,65	100,00	Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu (85%)	
15	3.28.03.1.07	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun	100.000.000,00	99.651.650,00	99,65	100,00	Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu (85%)	
16	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	305.101.000,00	250.568.075,00	82,13	100,00	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	
17	3.28.04.1.03.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	225.402.500,00	176.497.502,00	78,30	100,00	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH (10 KPH)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
18	3.28.05.1.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	13.109.546.470,00	12.223.583.597,00	93,24	100,00	Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial (10) KPH	
19	3.28.06.1.01.	Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	550.000.000,00	511.180.608,00	92,94	100,00	Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH (10 KPH)	
J U M L A H			87.451.095.660	80.415.328.501,52	91,95	100,00		

III. REALISASI KEUANGAN PER SUB KEGIATAN

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
		1. SEKRETARIAT	46.747.940.107,00	44.158.770.794,00	94,46	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.311.469,00	223.413.300,00	92,97	100,00	Dokumen DPA SKPD, Dokumen Perubahan DPA SKPD, Dokumen RKA SKPD, Dokumen Renstra dan Renja dan Dokumen Perubahan RKA yang disusun	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364.883.208,00	337.343.592,00	92,45	100,00	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan sebanyak 4 dokumen	
3	3.28.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.089.703.563,00	37.003.915.843,00	94,66	100,00	Gaji dan tunjangan ASN dishut yang dibayarkan dalam 1 tahun	
4	3.28.01.1.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.746.704,00	800.471.500,00	86,94	100,00	Jasa administrasi pengelola keuangan dan jasa administrasi PTT dalam 1 tahun	
5	3.28.01.1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.346.000,00	22.100.250,00	98,90	100,00	Laporan keuangan akhir tahun	
6	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102.642.296,00	100.701.250,00	98,11	100,00	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disiapkan	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
7	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	540.127.320,00	461.031.474,00	85,36	100,00	Terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset gedung dan kendaraan dinas operasional	
8	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	222.000.000,00	196.261.821,00	88,41	100,00	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
9	3.28.01.1.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	222.745.000,00	215.408.350,00	96,71	100,00	Aparatur sipil negara dishut yang mengikuti BIMTEK (450 orang)	
10	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.163.400,00	36.163.400,00	100,00	100,00	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 1 tahun	
11	3.28.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	723.797.500,00	709.585.925,00	98,04	100,00	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 tahun	
12	3.28.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.943.000,00	136.614.250,00	97,62	100,00	Alat tulis yang disediakan, makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	
13	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.116.000,00	75.140.500,00	88,28	100,00	Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan selama 1 tahun	
14	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.160.000,00	46.680.000,00	98,98	100,00	Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang disediakan	
15	3.28.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	285.410.109,00	95,14	100,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun	
16	3.28.01.1.07.05.	Pengadaan Mebel	420.000.000,00	399.912.668,00	95,22	100,00	Pengadaan Mebeleur yang diadakan selama 1 tahun	
17	3.28.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.325.000,00	89.040.000,00	99,68	100,00	Jumlah surat yang didistribusikan	
18	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.242.986,00	235.322.657,00	95,18	100,00	Belnja air, internet, telepon, listrik yang terbayarkan selama 1 tahun	
19	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	901.751.690,00	814.671.503,00	90,34	100,00	Honor PTT, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Kesehatan Jasmani, Jasa Kesehatan Rohani, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa Sopir Kantor selama 1 tahun	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
20	3.28.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	667.220.000,00	654.118.751,00	98,04	100,00	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional, kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	
21	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.186.074.971,00	1.183.738.651,00	99,80	100,00	Jasa balik nama kendaraan, jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional serta kendaraan dinas yang dipelihara	
22	3.28.01.1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	178.640.000,00	131.725.000,00	73,74	100,00	Gedung kantor dan rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	
		2. BIDANG PPMHA	3.087.507.500,00	2.494.846.682,00	80,80	100,00		
1	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	460.000.000,00	454.576.403,00	98,82	100,00	Jumlah penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya (250 orang), Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan (10 Unit) dan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara (10 Unit)	
2	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	350.000.000,00	341.885.611,00	97,68	100,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi (100 Kelompok)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
3	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.277.507.500,00	1.698.384.668,00	74,57	100,00	Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum (100 Orang), Jumlah Fasilitas pengembangan Usaha (3 Kelompok), Jumlah Fasilitas Kewirausahaan (5 Kali), Jumlah Stup Lebah Madu Itama (220 Stup), Jumlah Unit Ekonomi Produktif dan Sarpras Ekowisata yang Difasilitasi (3 Unit), Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi (DAK) dan Jumlah Usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok)	
		3. BIDANG PHKSDAE	1.915.582.500,00	1.833.534.903,00	95,72	100,00		
1	3.28.03.1.01.03.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	200.000.000,00	199.904.226,00	99,95	100,00	Jumlah Sarana Prasarana Operasional KPH yang tersedia dan terpelihara (10 KPH)	
2	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	690.180.000,00	671.845.600,00	97,34	100,00	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutan yang tertangani (5 kasus), Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (160 kali), Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan (1 Peta) dan Jumlah Satgas LMPHBN (450 Orang)	
3	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	30.000.000,00	28.761.200,00	95,87	100,00	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi yang dilaksanakan (20 Kali)	
4	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	770.000.000,00	756.526.375,00	98,25	100,00	Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi (150 Orang) dan Jumlah Patroli, Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH (150 Kali)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
5	3.28.04.1.03.05.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	60.832.500,00	56.792.500,00	93,36	100,00	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi yang dilaksanakan (10 Kali)	
6	3.28.04.1.03.06.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	164.570.000,00	119.705.002,00	72,74	100,00	Jumlah kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting di kewenangan daerah Provinsi yang dikelola (4 Kali)	
		4. BIDANG PDASRHL	1.550.250.500,00	1.428.833.196,00	92,17	100,00		
1	3.28.03.1.04.01.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.000.000,00	71.356.900,00	75,11	100,00	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun (1 Dokumen)	
2	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	605.250.500,00	567.486.591,00	93,76	100,00	Luas Hutan Rakyat yang terbangun (300 Ha)	
3	3.28.03.1.04.08.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	300.000.000,00	278.809.097,00	92,94	100,00	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 (1 Dokumen) dan Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	
4	3.28.06.1.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	100.000.000,00	97.860.350,00	97,86	100,00	Jumlah Dokumen DAS yang tersusun (1 Dokumen)	
5	3.28.06.1.01.02.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	250.000.000,00	238.830.586,00	95,53	100,00	Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terre-enumerasi (10 Petak) dan Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun (10 KPH)	
6	3.28.06.1.01.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100.000.000,00	87.087.850,00	87,09	100,00	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan (2 Kelompok)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
7	3.28.06.1.01.05.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	100.000.000,00	87.401.822,00	87,40	100,00	Jumlah Kajian Pengelolaan DAS (1 Dokumen)	
		5. BIDANG PRPH	1.225.000.000,00	1.152.271.362,00	94,06	100,00		
1	3.28.03.1.01.02.	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	100.000.000,00	97.174.800,00	97,17	100,00	Panjang penataan blok / pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana (10 KM)	
2	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	105.000.000,00	83.537.400,00	79,56	100,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun (12 Dokumen)	
3	3.28.03.1.03.02.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	100.000.000,00	98.501.750,00	98,50	100,00	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia (1 Dokumen)	
4	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	100.000.000,00	98.669.260,00	98,67	100,00	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi (27 Unit) dan Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBPN) (10 KPH)	
5	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	100.000.000,00	99.553.798,00	99,55	100,00	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi (20 Unit) dan Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBPN) (10 KPH)	
6	3.28.03.1.03.06.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	17.391.000,00	86,96	100,00	Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Produksi yang dinilai (3 Dokumen)	
7	3.28.03.1.03.07.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	50.000.000,00	49.579.400,00	99,16	100,00	Jumlah dokumen rencana pengelolaan di kawasan Hutan Lindung yang dinilai (7 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
8	3.28.03.1.03.08.	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	200.000.000,00	167.661.500,00	83,83	100,00	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan (10 Kelompok)	
9	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	250.000.000,00	240.585.354,00	96,23	100,00	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (10 Komoditi/Produk) dan Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH (10 Unit)	
10	3.28.03.1.06.04.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	100.000.000,00	99.965.450,00	99,97	100,00	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali (20 Unit)	
11	3.28.03.1.07.02.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	100.000.000,00	99.651.650,00	99,65	100,00	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang terkendali (40 Unit)	
		6. UPTD BSPTH	2.454.029.954,00	2.341.095.899,00	95,40	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.768.000,00	35,36	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah	
4	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah Komponen-komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	
5	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Amplop, kop surat, kwitansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen)	
6	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
7	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.434.000,00	55.204.297,00	89,86	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	
8	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.653.600,00	40.637.929,00	99,96	100,00	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	
9	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.568.754,00	173.266.000,00	99,83	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab / bangunan lainnya yang dipelihara	
10	3.28.03.1.04.06.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	1.840.000.000,00	1.792.628.998,00	97,43	100,00	Jumlah Arboretum untuk Pelestarian Sumber Daya Genetik (1 Unit), Jumlah Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang Terbangun (12 Unit) dan Jumlah Unit Perbenihan yang dikembangkan (1 Unit)	
11	3.28.03.1.09.01.	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	94.420.000,00	67.826.825,00	71,84	100,00	Jumlah Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit (6 Unit)	
12	3.28.03.1.09.02.	Sertifikasi Sumber Benih	50.000.000,00	48.283.250,00	96,57	100,00	Jumlah Sertifikasi Sumber Benih (2 Sertifikat)	
13	3.28.03.1.09.03.	Sertifikasi Mutu Benih	47.790.000,00	31.811.650,00	66,57	100,00	Jumlah Sertifikasi Mutu Benih (5 Sertifikat)	
14	3.28.03.1.09.04.	Sertifikasi Mutu Bibit	25.700.000,00	22.294.200,00	86,75	100,00	Jumlah Sertifikasi Mutu Bibit (10 Sertifikat)	
15	3.28.03.1.09.05.	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	87.191.000,00	80.352.150,00	92,16	100,00	Jumlah pengawasan peredaran peredaran benih dan/atau bibit (7 Unit)	
		7. UPTD KPHL PASAMAN RAYA	5.089.671.125,00	4.920.774.482,00	96,68	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD, perubahan RKA SKPD, dokumen DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (4 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.960.000,00	99,67	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.800.000,00	98,67	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disiapkan (12 Dokumen)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.000.000,00	45.260.000,00	94,29	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (64 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.384.600,00	100,00	100,00	Jumlah komponen komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Unit)	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (amplop, kop surat, kwintansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen) (1 Set)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.880.000,00	82,76	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Buah)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.896.000,00	20.700.263,00	79,94	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet, TV kabel yang dibayarkan (12 Bulan), Jumlah rekeining tagihan telepon yang dibayarkan (1 Rekening), Jumlah tagihan air yang dibayarkan (520 m3) dan Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan (16440 KwH)	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.362.525,00	126.833.844,00	94,40	100,00	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (6 Orang)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.912.000,00	99,80	100,00	Jumlah gedung kantor UPTD dab Resort yang terpelihara (2 Unit)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	45.000.000,00	1.740.875,00	92,76	100,00	Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang UPTD KPH (DBH DR) (1 Dokumen) dan Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka pendek panjang UPTD KPH (DBH DR) (1 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	18.782.300,00	93,91	100,00	Jumlah perizinan berusaha di bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada kawasan hutan produksi (3 Unit)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000,00	29.196.550,00	97,32%	100,00	Jumlah perizinan berusaha di bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang termonitor pada kawasan hutan lindung (6 Unit)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	220.000.000,00	218.763.450,00	99,44	100,00	Jumlah komoditi/atau produk yang dikembangkan (1 Komoditi) dan Jumlah sarana dan prasarana ekowisata yang terfasilitasi (1 Unit)	
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.765.000.000,00	1.687.236.450,00	95,59	100,00	Luas Hutan Rakyat yang Terbangun (225 Ha)	
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	213.640.000,00	2017.292.700,00	97,03	100,00	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (DBH-DR) (16 Kali) dan Jumlah Satgas LMPHBN (60 Orang)	
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	18.794.100,00	93,97	100,00	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi yang dilaksanakan (DBH-DR) (2 Kali), Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi yang dilaksanakan (DBH-DR) (2 Kali) dan Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi yang dilaksanakan (DBH-DR) (4 Kali)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	60.000.000,00	59.546.700,00	99,24	100,00	Jumlah Patroli, Koordinasi, Singkronisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Wilayah Kelola KPH (DBH-DR) (15 Kali)	
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000,00	48.606.750,00	97,21	100,00	Luas Budidaya Tanaman Unggulan Lokal dan Produktif (5 Ha)	
21	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	100.000.000,00	99.379.400,00	99,38	100,00	Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara (1 Unit)	
22	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	215.000.000,00	210.048.500,00	97,70	100,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Terfasilitasi (10 Kelompok)	
23	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.035.000.000,00	1.981.748.000,00	97,38	100,00	Jumlah Fasilitasi Kewirausahaan (5 Kali), Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha (3 Kelompok), Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi (40 Kelompok), Jumlah Stup Madu Itama (220 Stup), Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi (DAK) (3 Unit), Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi (600 Stup) dan Jumlah Usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok)	
		8. UPTD KPHL LIMAPLUH KOTA	5.216.319.196,00	2.618.285.458,00	50,19	51,19		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.922.300,00	99,22	100,00	Jumlah dokumen DPA dan Perubahan DPA SKPD yang disusun (2 Dokumen) dan Jumlah dokumen RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.942.550,00	99,52	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.988.550,00	99,92	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (18 Dokumen)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	Jumlah Unit yang dilakukan pen jagaan (1 Unit)	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Batik) (37 Stel) dan Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (PDH) (37 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (1 Unit)	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (1 Unit)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.600,00	3.000.000,00	99,98	100,00	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (24 Eksemplar)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.850.900,00	22.864.394,00	95,86	100,00	Jumlah Kapasitas Tagihan Internet yang Dibayarkan (12 Mbps) dan Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang Dibayarkan (8000 KVA)	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.082.636,00	134.029.364,00	99,96	100,00	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (3 Orang)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap/bangunannya yang dipelihara (1 Unit)	
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	42.930.560,00	41.886.500,00	97,57	97,57	Dokumen Revisi RPHJP KPHL Lima Puluh Kota tahun 2014-2023 (1 Dokumen) dan Dokumen RPHJP di Lima Puluh Kota tahun 2023 (1 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	19.999.400,00	100,00	100,00	Jumlah Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Wilayah Kelola Perhutanan Sosial yang Termonitor pada Kawasan Hutan Produksi (5 Unit)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	18.882.300,00	18.680.000,00	98,93	100,00	Jumlah Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Wilayah Kelola Perhutanan Sosial yang Termonitor pada Kawasan Hutan Lindung (22 Unit)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	220.000.000,00	218.397.400,00	99,27	100,00	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH (1 Komoditi) dan Tersedianya Sarpras Ekowisata (1 Paket)	
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2.716.899.600,00	183.189.050,00	6,74	6,82	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab/P0 (DAK) (538 Ha), Luas hutan rakyat terbangun/rehab/P1 (DBH-DR) (25 Ha) dan Luas hutan rakyat yang terbangun/direhab/P1 (PAD) (50 Ha)	
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	160.580.000,00	152.888.850,00	95,21	98,97	Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani (2 Kasus), Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (17 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)	
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.403.050,00	96,02	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (8 Kali)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	60.000.000,00	58.364.200,00	97,27	100,00	Jumlah koordinasi, singronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (4 Kali), Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi (100 Orang) dan Jumlah patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)	
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000,00	41.028.550,00	82,06	100,00	Luas Budidaya Tanaman Unggulan Lokal dan Produktif	
21	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	25.000.000,00	24.296.500,00	97,19	100,00	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan (1 Unit)	
22	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	49.981.700,00	99,96	99,96	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi (3 Kelompok)	
23	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.522.000.000,00	1.481.330.500,00	97,33	99,95	Jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum (100 Orang), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (20 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kali), Jumlah stup lebah madu yang disediakan (274 Stup), Jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (4 Unit) dan Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok)	
		9. UPTD KPHL AGAM RAYA	3.210.589.799,00	3.111.230.663,00	96,91	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.725.000,00	97,25	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.710.000,00	97,58	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.821.000,00	98,81	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.500.000,00	28.499.972,00	100,00	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (42 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (12 Bulan)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Buah)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.295.400,00	23.603.770,00	93,31	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (1200 mbps), Jumlah tagihan Air (PDAM) dan Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (12000 Kwh)	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.656.649,00	126.643.564,00	99,99	100,00	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia (3 Orang)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap (1 Unit)	
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	40.000.000,00	36.409.150,00	91,02	100,00	Jumlah dokumen rancang bangunan tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun (2 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	19.596.600,00	97,98	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dikoordinasikan/dikendalikan (1 Izin usaha/kerjasama)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	19.611.600,00	98,06	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan (1 KPH)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	434.078.000,00	423.002.850,00	97,45	100,00	Jumlah Sarana Prasarana Ekowisata pada wilayah KPH (3 Unit) dan Jumlah Unit Pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1 Komoditi)	
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.432.500.000,00	1.390.630.907,00	97,08	100,00	Luas hutan rakyat diluar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P0) (125 ha), Luas hutan rakyat diluar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P1) (50 ha) dan Luas hutan rakyat diluar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P2) (105 ha)	
17	3.28.03.1.04.06.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	50.000.000,00	49.723.650,00	99,45	100,00	Jumlah Januari sampai Desember (1 Unit)	
18	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	171.600.000,00	161.955.950,00	94,38	100,00	Jumlah Patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (18 Kali) dan Jumlah Satgas LMPHBN yang diberdayakan (50 Orang)	
19	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.458.450,00	96,39	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (5 Kali)	
20	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	41.119.850,00	82,24	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan /penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan (12 Kali)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
21	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000,00	47.656.100,00	95,31	100,00	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5 Ha)	
22	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	638.887.150,00	620.989.650,00	97,20	100,00	Jumlah stup lebah madu yang disediakan (172 Stup), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (7 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (1 Unit) dan Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (3 Kelompok)	
		10. UPTD KPHL BUKIT BARISAN	5.972.277.525,00	5.691.732.079,00	95,30	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.933.000,00	98,66	100,00	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun (2 Dokume)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.564.400,00	96,37	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	Hororarium pengurus / Penyimpan BMD (12 Bulan)	
4	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000,00	65.934.000,00	99,90	100,00	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan (96 Stel)	
5	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)	
6	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (12 Bulan)	
7	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 jenis)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
8	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.580.000,00	57.889.911,00	69,26	100,00	Air (1 Tahun), Internet (1 Tahun), Listrik (1 Tahun) dan Telepon (1 Tahun)	
9	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.154.925,00	212.512.345,00	82,32	100,00	Jasa Kesehatan Jasmani (12 Bulan), Jasa Rohaniawan (12 Bulan), Jasa Tenaga Administrasi Non ASN (12 Bulan), Jasa Tenaga Keamanan (13 Bulan) Jasa Tenaga Kebersihan (13 Bulan) dan Jasa Tenaga Supir Kantor (13 Bulan)	
10	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.888.000,00	99,75	100,00	Gedung kantor yang dipelihara (3 Unit)	
11	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	45.000.000,00	42.505.000,00	94,46	100,00	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)	
12	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	18.308.000,00	91,54	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi yang dikoordinasikan/dikendalikan (4 Izin usaha/kerjasama)	
13	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000,00	29.944.250,00	99,81	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan (4 Izin usaha/kerjasama)	
14	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	920.000.000,00	915.785.857,00	99,54	100,00	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dikembangkan (5 Unit)	
15	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.828.750.000,00	1.774.743.075,00	97,05	100,00	Luas hutan rakyat Diluar Kawasan Hutan yang dibangun/direhab	
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	267.720.000,00	261.438.950,00	97,65	100,00	Jumlah kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan kawasan Hutan yang dilakukan dan Jumlah Satgas LMPHBN	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.558.000,00	97,79	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan	
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	64.196.350,00	91,71	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan /penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan	
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	100.000.000,00	97.317.000,00	97,32	100,00	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 ha)	
20	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	100.000.000,00	92.525.200,00	92,53	100,00	Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	
21	3.28.05.1.01.02.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	300.000.000,00	283.309.000,00	94,44	100,00	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Terfasilitasi	
22	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.775.000.000,00	1.668.307.141,00	93,99	100,00	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi dan Jumlah stup lebah madu yang disediakan	
		11. UPTD KPHL SIJUNJUNG	2.388.995.125,00	2.353.577.207,00	98,52	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.507.000,00	95,07	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.612.500,00	96,77	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.988.350,00	99,92	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	100,00	Terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset gedung dan kendaraan dinas operasional	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (26 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.335.600,00	99,87	100,00	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Unit)	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.359.668,00	11.359.500,00	100,00	100,00	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (1 Set)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (1 Buah)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.220.000,00	33.266.318,00	80,70	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (12 Bulan), Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan (667 M3) dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (25904.4 Kwh)	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.446.857,00	127.729.364,00	95,72	100,00	Jumlah tenaga jasa kesehatan jasmani (6 Kali), Jumlah tenaga kebersihan kantor (1 Orang), Jumlah tenaga kesehatan rohani (wirid bulanan) (12 Kali), Jumlah tenaga pengaman kantor (1 Orang) dan Jumlah tenaga sopir kantor (1 Orang)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (2 Unit)	
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	45.000.000,00	44.732.950,00	99,41	100,00	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	19.506.000,00	97,53	100,00	Jumlah izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang dikoodinasikan/dikendalikan (2 Unit)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	19.172.550,00	95,86	100,00	Jumlah izin usha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dikoodinasikan/dikendalikan (2 Unit)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	220.000.000,00	214.512.050,00	97,51	100,00	Jumlah unit pemanfaatan hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan yang dikembangkan (1 Komoditi)	
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	460.000.000,00	457.474.975,00	99,45	100,00	Luas hutan rakyat Diluar Kawasan Hutan yang dibangun/direhab (50 Ha)	
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	180.580.000,00	180.346.750,00	99,87	100,00	Jumlah kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan kawasan Hutan yang dilakukan (16 Kali) dan Jumlah Satgas LMPHBN (45 Orang)	
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.308.650,00	95,39	100,00	Jumlah koordinasi dan Singkronisasi fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan yang dilaksanakan (2 Kali)	
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	60.000.000,00	59.846.800,00	99,74	100,00	Jumlah koordinasi dan Singkronisasi fasilitasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan (15 Kali)	
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	100.000.000,00	99.247.750,00	99,25	100,00	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (Tanaman unggulan kayu putih) (1 Unit)	
21	3.28.05.1.01.01.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	200.000.000,00	197.201.350,00	98,60	100,00	Jumlah kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan yang dilaksanakan (Pembuatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan) (2 Unit)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
22	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	745.000.000,00	738.388.750,00	99,11	100,00	Jumlah fasilitasi kewirausahaan (5 Kali), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah stup lebah trigona (300 Stup), Jumlah usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok) dan Luas wilayah Perhutanan Sosial yang dikembangkan (2800 Ha)	
		12. UPTD KPHL SOLOK	2.600.083.539,00	2.521.151.599,52	96,96	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.676.000,00	96,76	100,00	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun (1 Dokumen), Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (1 Dokumen), Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun (1 Dokumen) dan Jumlah RKA SKPD yang disusun (1 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.155.250,00	92,96	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.999.500,00	100,00	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (70 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan (12 Bulan)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Jenis)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.070.000,00	26.723.623,00	83,33	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (1200 Mbps), Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan (420 meter kubik), dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (8000 Kwh)	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.740.939,00	130.729.364,00	99,99	100,00	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia (3 Orang)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/rehab (1 Unit)	
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	45.000.000,00	44.010.750,00	97,80	100,00	Jumlah dokumen rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	18.923.700,00	94,62	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 Izin usaha / kerjasama)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	19.419.550,00	97,10	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (2 Izin usaha / kerjasama)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	420.000.000,00	398.817.212,52	94,96	100,00	Jumlah sarana prasarana ekowisata pada wilayah KPH (2 KPH) dan Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (3 Unit)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.007.200.000,00	979.114.000,00	97,21	100,00	Ipemeliharaan Hutan Rakyat Tahun 1 (P1) (150 Ha) dan Penanaman Hutan Rakyat (P0) (48 Ha)	
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	181.600.000,00	168.597.500,00	92,84	100,00	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)	
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.143.000,00	94,29	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (10 Kali)	
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	49.458.900,00	98,92	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pencegahan / penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan (15 Kali)	
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000,00	49.985.900,00	99,97	100,00	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5 Ha)	
21	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	478.700.000,00	472.624.750,00	98,73	100,00	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah Usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok), Jumlah fasilitasi kewirausahaan (5 Kelompok), Jumlah stup madu ItaMa (200 Unit) dan Jumlah stup lebah madu Torasika (100 Unit)	
		13. UPTD KPHL HULU BATANGHARI	1.168.801.257,00	1.157.076.877,00	99,00	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.998.900,00	10.393.900,00	94,50	100,00	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (2 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.123.500,00	18.066.500,00	99,69	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun (4 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.986.500,00	15.571.500,00	97,40	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang disiapkan (12 Dokumen)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah (1 Orang)	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	29.998.860,00	100,00	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (40 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (12 Bulan)	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	9.881.500,00	94,61	100,00	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (12 Bulan)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (2 Jenis)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.675.264,00	15.948.388,00	85,40	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (100 Mbps), Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayar (480 M3) dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan (5992.357333 Kwh)	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.604.493,00	122.377.361,00	96,66	100,00	Instruktur Kesehatan Jasmani / Instruktur Senam (12 Kegiatan), Jasa Kebersihan Kantor (13 Bulan), Pengamanan Kantor (13 Bulan) dan Jasa Sopir Kantor (13 Bulan)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.966.691,00	99,93	100,00	Jumlah gedung kantor UPTD KPHL Hulu Batangharu yang diperlihara (1 Unit)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	40.000.000,00	39.463.100,00	98,66	100,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RHJP) yang direvisi dan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RHJPd) yang disusun (1 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	19.985.063,00	99,93	100,00	Jumlah izin usaha atau kerja sama pemanfaatan dikawasan hutan produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (4 Izin usaha)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	20.000.000,00	19.800.035,00	99,00	100,00	Jumlah izin usaha kerjasama pemanfaatan dikawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	20.000.000,00	19.989.938,00	99,95	100,00	Jumlah unit pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan / atau Jasa Lingkungan yang Dikembangkan (2 Unit)	
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	137.520.000,00	137.399.999,00	99,91	100,00	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari (15 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan di Wilayah KPHL Hulu Batang Hari (30 Orang)	
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (3 Kali)	
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	49.534.250,00	99,07	100,00	Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batanghari (15 Kali)	
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi	50.000.000,00	49.906.550,00	99,81	100,00	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5.5 Ha)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
		Pokoknya						
21	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	524.820.000,00	523.164.642,00	99,68	100,00	Jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti form (60 Orang) Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (2 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (5 Kali), Jumlah stup lebah madu yang disediakan (160 Stup), Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (2 Kelompok) dan Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan (3650 Ha)	
		14. UPTD KPHP DHARMASRAYA	1.324.586.783,00	1.300.630.515,00	98,19	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.999.000,00	99,99	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disiapkan	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (amplop, kop surat, kwintansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang disediakan	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.164.000,00	28.371.332,00	91,04	100,00	Belnja air, internet, telepon, listrik yang terbayarkan selama 1 tahun	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.341.363,00	122.341.363,00	100,00	100,00	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap	
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	40.000.000,00	38.107.000,00	95,27	100,00	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (2 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	19.860.000,00	19.860.000,00	100,00	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (2 Izin usaha / Kerjasama)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	9.530.000,00	9.530.000,00	100,00	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 KPH)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	20.000.000,00	19.650.000,00	98,25	100,00	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1 Unit)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	170.580.000,00	170.394.538,00	99,89	100,00	Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani (2 Kasus), Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali), Jumlah peta rawan kerusakan hutan yang tersedia (1 Peta) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)	
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.000.000,00	14.898.775,00	99,33	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (5 Kali)	
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	70.000.000,00	69.550.245,00	99,36	100,00	Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi (15 Orang) dan Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)	
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	49.625.000,00	49.625.000,00	100,00	100,00	Luas hasil hutan bukan kayu dibudidayakan (5 Hektar)	
20	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	636.913.820,00	618.730.662,00	97,15	100,00	Jumlah anggota perhutanan sosial yang mengikuti form (85 Orang), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (4 Kelompok), Jumlah kewirausahaan yang difasilitasi (4 Kali), Jumlah stup lebah madu yang disediakan (165 Stup), Jumlah unit ekonomi produktif yang difasilitasi (2 Unit) dan Jumlah usulan perhutanan sosial yang difasilitasi (3000 Hektar)	
		15. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	2.644.923.125,00	2.509.583.759,00	94,88	100,00		

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.998.250,00	99,98	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.960.800,00	99,67	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.997.750,00	99,99	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran yang disiapkan (12 Bulan)	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	Jasa pengurus / penyimpan BMD yang disediakan (12 Bulan) dan Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun (2 Dokumen)	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00	Jumlah oengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (42 Stel)	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Set)	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (1 Set)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	100,00	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (12 Bulan)	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.747.501,00	15.367.126,00	77,82	100,00	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (100 Mbps), Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan (9468 Kwh) dan Jumlah tagihan PDAM yang dibayarkan (668 M3)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.862.525,00	133.029.364,00	95,80	100,00	Jumlah tenaga jasa kesehatan rohani (wirid mingguan / bulanan / program ramadhan) (10 Kegiatan), Jumlah tenaga kebersihan kantor (1 Orang), Jumlah tenaga pengaman kantor (1 Orang) dan Jumlah tenaga sopir kantor (1 Orang)	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.007.999,00	72.006.099,00	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor (Resort) yang dipelihara (2 Unit)	
12	3.28.03.1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	45.000.000,00	44.653.550,00	99,23	100,00	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPTD KPHP Pesisir Selatan (1 Dokumen) dan Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPHP Pesisir Selatan (1 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000,00	19.982.000,00	99,91	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (5 Izin usaha / Kerjasama)	
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	10.000.000,00	9.982.000,00	99,82	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 Izin usaha / Kerjasama)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	620.000.000,00	618.123.200,00	99,70	100,00	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (4 Unit)	
16	3.28.03.1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	837.302.500,00	724.007.000,00	86,47	100,00	Luas pengijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara yang dibangun / direhab (15 Hektar) dan Luas penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara yang dibangun / direhab (50 Hektar)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
17	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	190.580.000,00	190.544.550,00	99,98	100,00	Jumlah patroli pengamanan hutan yang dilaksanakan (16 Kali) dan Jumlah satgas LMPHBN yang diberdayakan (45 Orang)	
18	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.990.850,00	99,95	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali)	
19	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	60.000.000,00	57.978.200,00	96,63	100,00	Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)	
20	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000,00	49.993.450,00	99,99	100,00	Luas Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibudidayakan (5 Ha)	
21	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	470.000.000,00	462.546.970,00	98,41	100,00	Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Pesisir Selatan Wilayah Kelola KPHP Pesisir Selatan (1 Kelompok), Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok), Jumlah Stup Lebah Madu Itama (265 Unit), Jumlah usulan Perhutanan Sosial (3 Kelompok) dan Stup Lebah Lokasi di Kambang Timut Kab. Pesisir Selatan sebanyak 25 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Money lebah madu (50 Unit)	
		16. UPTD KPHP MENTAWAI	854.537.625,00	821.933.026,00	96,18	100,00		
1	3.28.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.392.000,00	93,92	100,00	Jumlah dokumen RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD yang disusun (2 Dokumen)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
2	3.28.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000,00	14.588.000,00	91,18	100,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan (4 Dokumen)	
3	3.28.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.000.000,00	20.110.000,00	95,76	100,00	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester yang disiapkan	
4	3.28.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00	Jumlah pengelola barang milik daerah	
5	3.28.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000,00	23.976.000,00	99,90	100,00	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
6	3.28.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.348.600,00	10.348.600,00	100,00	100,00	Jumlah Komponen-komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	
7	3.28.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.444.000,00	10.444.000,00	100,00	100,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (amplop, kop surat, kwintansi, map opd, jilid, pengadaan dokumen)	
8	3.28.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00	Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan yang disediakan	
9	3.28.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.749.500,00	11.580.950,00	43,29	100,00	Belanja air, internet, telepon, listrik yang terbayarkan selama 1 tahun	
10	3.28.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.862.525,00	122.168.276,00	94,08	100,00	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	
11	3.28.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	100,00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap	
12	3.28.03.1.02.01	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	55.000.000,00	52.654.000,00	95,73	100,00	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (1 Dokumen)	
13	3.28.03.1.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	17.390.000,00	17.128.000,00	98,49	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 Izin Usaha / Kerjasama)	

No	Kode Rek	Nama Program	Jumlah		Realisasi		Hasil Target Kinerja	Ket
			Anggaran	Realisasi	Keuangan	Fisik		
			Rp.	Rp.	%	%		
14	3.28.03.1.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	17.745.000,00	17.145.000,00	96,62	100,00	Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan / dikendalikan (1 KPH)	
15	3.28.03.1.03.09.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	20.000.000,00	19.784.000,00	98,92	100,00	Jumlah unit pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan / atau jasa lingkungan yang dikembangkan (1 Unit)	
16	3.28.03.1.05.02.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	120.000.000,00	118.635.000,00	98,86	100,00	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan yang dilakukan (16 Kali)	
17	3.28.03.1.05.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20.000.000,00	19.985.000,00	99,93	100,00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan (2 Kali)	
18	3.28.03.1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	49.690.000,00	99,38	100,00	Jumlah patroli, koordinasi, sinkronisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kelola KPH (15 Kali)	
19	3.28.03.1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000,00	49.860.000,00	99,72	100,00	Luas hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan (5 Ha)	
20	3.28.05.1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	205.718.000,00	204.164.200,00	99,24	100,00	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi (5 Kelompok) dan Jumlah stup lebah madu yang disediakan (165 Stup)	
Jumlah			87.451.095.660,00	80.415.328.501,52	91,95	96,95		

Ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program:

- Program dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 program
- Program dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 3 program (rata-rata 93,56%).
- Program dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80% - 90%) sebanyak 1 program (rata-rata 85,80%).
- Program dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%- 80%) sebanyak 1 program (rata-rata 78,30%).
- Program dengan kategori gagal (capaian kinerja 0%-60%) sebanyak 0 program

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan :

- Kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 kegiatan
- Kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 15 kegiatan (rata-rata 95,74%)
- Kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 2 kegiatan (rata-rata 84,00%)
- Kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%-80%) sebanyak 2 kegiatan (rata-rata 77,63%).
- Kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 0 kegiatan

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan :

- Sub kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 sub kegiatan
- Sub kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 44 sub kegiatan (rata-rata 96,59%)
- Sub kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 8 sub kegiatan (rata-rata 86,33%)
- Sub kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%-80%) sebanyak 6 sub kegiatan (rata-rata 72,14%).
- Sub kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 0 sub kegiatan

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan tidak ada, akan tetapi beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya pencapaian target adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Kurang sinkronnya penyusunan rencana waktu pelaksanaan kegiatan dan penarikan dan ketersediaan anggaran.
- c. Kurangnya jumlah, kapasitas dan kemampuan personil pelaksana kegiatan terutama program dan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat luas.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana dan pembiayaan pendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Kehutanan.
- e. Belum optimalnya kelembagaan forum koordinasi serta peranserta Lembaga, instansi, LSM, kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemerhati lingkungan yang terkait dalam pembangunan kehutanan.

Beberapa sub kegiatan yang memiliki realisasi rendah dibawah 90%, penyebabnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
1. Sekretariat						
1	3.28.01. 1.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.746.704	800.471.500	86,94	120.275.204
		Sisa dana sebesar Rp.120.275.204 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Honorarium Rp.108.680.000,00 dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 11.595.204,00 Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena pembayaran sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.				
2	3.28.01. 1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	540.127.320	461.031.474	85,36	79.095.846
		Sisa dana sebesar Rp.79.095.846,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 5.061.870,00, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp4.360.983,00, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp. 35.650.493,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.34.022.500,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya efisiensi / sisa mati biaya penginapan dan pembayaran premi asuransi dibawah standar harga pada SIPD.				
3	3.28.01. 1.08.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	222.000.000	196.261.821	88,41	25.738.179
		Sisa dana sebesar Rp.25.738.179,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp13.738.080,00 dan Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp.12.000.099,00 Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan tidak dilakukan perubahan anggaran terhadap pengadaan belanja pakaian dinas.				
4	3.28.01. 1.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.116.000	75.140.500	88,28	9.975.500
		Sisa dana sebesar Rp. 9.975.500,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Rp.2.130.000,00 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 7.845.500,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan terutama karena tidak dilakukan perubahan anggaran terhadap belanja LS.				

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
5	3.28.01. 1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	178.640.000	131.725.000	73,74	46.915.000
		Sisa dana sebesar Rp. 46.915.000,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik Rp.50.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 20.190.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya Rp.920.000,00 dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp.25.755.000,00 . Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan terutama karena pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kondisi peralatan kantor yang mengalami kerusakan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan permintaan dari bidang atau UPTD.				
2. PPMHA						
6	3.28.05. 1.01.03.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.277.507.500	1.698.384.668	74,57	579.122.832
		Sisa dana sebesar Rp.579.122.832,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp.992.758,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp.4.560.000,00, Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp.526.404.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.56.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp.860.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp.13.400.000,00, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp.16.000.000,00, Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp.7.625.000,00, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 3.200.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.720.074,00, Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp.3.940.000,00 dan Belanja Modal Personal Computer 1.365.000,00 .Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan terutama karena dana DAK tidak dilaksanakan disebabkan tidak disetujui pusat.				
3. PHKSDAE						
7	3.28.04. 1.03.06.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	164.570.000	119.705.002	72,74	44.864.998
		Sisa dana sebesar Rp.44.864.998,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.428.500,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.490.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas				

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
		Lapangan Rp. 36.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.500.000,00, Belanja Sosialisasi Rp.11.250.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 23.160.498,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan terutama karena adanya penghematan belanja makan minum dan perjalanan dinas.				
		4. PDASRHL				
8	3.28.03. 1.04.01.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.000.000	71.356.900	75,11	23.643.100
		Sisa dana sebesar Rp.23.643.100,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 299.600,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.60.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp.6.400.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 16.883.500,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena pembayaran honorarium narasumber dalam pelaksanaan rapat Koordinasi Penyusunan RTnRL tidak bisa dibayarkan karena narasumber dan peserta berasal dari instansi sendiri serta sisa Belanja Perjalanan Dinas Biasa merupakan Sisa/Efisiensi dari Biaya Penginapan Rp. 15.973.500,00 Uang Harian Rp.460.00 dan biaya Representasi Rp. 450.00,00.				
9	3.28.06. 1.01.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100.000.000	87.087.850	87,09	12.912.150
		Sisa dana sebesar Rp.12.912.150,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 66.650,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 69.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 516.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.700.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.560.500,00. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena pembayaran honorarium narasumber dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS tidak bisa dibayarkan karena narasumber dan peserta berasal dari instansi sendiri, turunnya realisasi juga disebabkan karena adanya sisa/efisiensi dari biaya makan / minum dan biaya penginapan.				
10	3.28.06. 1.01.05.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	100.000.000	87.401.822	87,40	12.598.178
		Sisa dana sebesar Rp. 12.598.178,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.452.500,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 922.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.500.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 2.963.678,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.760.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan pembayaran honorarium narasumber dalam Lokakarya Forum DAS tidak bisa dibayarkan karena narasumber dan peserta berasal dari instansi sendiri serta				

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
		adanya sisa/efisiensi dari belanja BBM, makan / minum, biaya penginapan dan unag harian KPH.				
	5. PRPH					
11	3.28.03. 1.02.01.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	105.000.000	83.537.400	79,56	21.462.600
		Sisa dana sebesar Rp. 21.462.600,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.726.100,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.740.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.000.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 12.996.500,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan pada saat workshop RPHJP di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Personil KPH yang hadir tidak melampirkan faktur BBM untuk kendaraan dinas yang digunakan pada saat menghadiri acara workshop, belanja jasa berupa Jasa Narasumber tidak dapat di SPJ kan dikarenakan Narasumber untuk Kepala Dinas Kehutanan tidak dapat dibayarkan disebabkan peserta workshop seluruhnya berasal dari personil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Belanja perjalanan dinas dalam negeri paling banyak bersisa dikarenakan adanya sisa anggaran penginapan eselon II, eselon III dan eselon IV/golongan III.				
12	3.28.03. 1.03.06.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	20.000.000	17.391.000	86,96	2.609.000
		Sisa dana sebesar Rp. 2.609.000,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 884.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.725.000,00,. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan terdapat sisa yang tidak digunakan antara lain sisa pembelian bahan bakar minyak dan sisa penginapan pada belanja perjalanan dinas.				
13	3.28.03. 1.03.08.	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	200.000.000	167.661.500	83,83	32.338.500
		Sisa dana sebesar Rp. 32.338.500 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 900.000,00, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 38.000,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 216.000,00, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.050.000,00, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 6.300.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.431.500,00, Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp.15.200.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan tidak dapat nya dicairkan dana transportasi FGD pada belanja kursus singkat/pelatihan senilai Rp. 6.300.000,- dan sisa perjalanan dinas dalam negeri berupa sisa penginapan yang tidak dapat dipergunakan kembali dikarenakan sumber dana berasal dari				

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
		DBH DR sebesar Rp. 22.781.500,-. Sisa lainnya berasal dari sisa belanja barang habis pakai.				
6. UPTD BSPTH						
14	3.28.01. 1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	1.768.000	35,36	3.232.000
		Sisa dana sebesar Rp. 3.232.000,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 10.000,00 dan Belanja Lembur Rp. 3.222.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan anggaran lembur yang tidak digunakan.				
15	3.28.01. 1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	1.250.000	50,00	1.250.000
		Sisa dana sebesar Rp. 1.250.000,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Lembur Rp. 1.250.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan anggaran lembur yang tidak digunakan.				
16	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.434.000	55.204.297	89,86	6.229.703
		Sisa dana sebesar Rp. 6.229.703,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.6.229.650,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan kelebihan platfon speedy.				
17	3.28.03. 1.09.01.	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	94.420.000	67.826.825	71,84	26.593.175
		Sisa dana sebesar Rp. 26.593.175,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 900.075,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 340.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 640.100,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 110.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 24.603.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan adanya kendala dalam mekanisme OSS.				
18	3.28.03. 1.09.03.	Sertifikasi Mutu Benih	47.790.000	31.811.650	66,57	15.978.350
		Sisa dana sebesar Rp. 15.978.350,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.986.850,00, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp. 1.250.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 711.500,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 110.000,00, Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp.1.700.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.220.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan adanya kendala dalam menunggu kematangan benih uji.				
19	3.28.03. 1.09.04.	Sertifikasi Mutu Bibit	25.700.000	22.294.200	86,75	3.405.800

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
		Sisa dana sebesar Rp. 3.405.800,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 1.364.550,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 316.250,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 110.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.615.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena rendahnya pengajuan sertifikasi bibit dari rekanan terdaftar.				
7. UPTD KPHL PASAMAN RAYA						
20	3.28.01. 1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000	2.880.000	82,76	600.000
		Sisa dana sebesar Rp. 600.000 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 600.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena tarif yang diminta sesuai dengan tagihan yang dibayarkan.				
21	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.896.000	20.700.263	79,94	5.195.737
		Sisa dana sebesar Rp. 600.000 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Tagihan Telepon Rp. 1.677,00, Belanja Tagihan Air Rp. 51.000,00, Belanja Tagihan Listrik Rp. 1.519.960,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan 3.623.100,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan tagihan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.				
8. UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA						
21	3.28.03. 1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2.716.899.600	183.189.050	6,74	2.533.710.550
		Sisa dana sebesar Rp. 2.533.710.550,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 48.058.915,00, Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 320.000.000,00, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 13.450,00, Belanja Bahan-Bahan Baku Rp. 15.210.000,00, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp. 1.324.548.125,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 100,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 47.732.960,00 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp780.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena terjadinya kegagalan dalam tender.				
22	3.28.03. 1.06.03.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	50.000.000	41.028.550	82,06	8.971.450
		Sisa dana sebesar Rp. 8.971.450,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 971.450,00 dan Belanja Modal				

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
		Pompa Rp. 8.000.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena terjadinya kegagalan dalam tender.				
9. UPTD KPHL AGAM RAYA						
23	3.28.03. 1.05.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000	41.119.850	82,24	8.880.150
		Sisa dana sebesar Rp. 8.880.150,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 7.354.150,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.426.000,00 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 100.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena BBM Jenis Pertalite yang sudah dianggarkan tidak di SPJkan karena pertalite tersebut dialokasikan untuk kendaraan Roda Dua di Kantor Resort, tetapi tidak digunakan oleh personil yang ada di resort tersebut. Sedangkan untuk BBM jenis Dextrite bersisa disebabkan beberapa perjalanan patroli karhutlah di seputaran Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Palembang tidak di SPJkan karena SPBU di Lubuk Basung tidak menyediakan Dextrite, sementara SPBU di Maninjau tidak dilewati rute tersebut.				
10. UPTD KPHL BUKIT BARISAN						
24	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.580.000	57.889.911	69,26	25.690.089
		Sisa dana sebesar Rp. 25.690.089,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Tagihan Telepon Rp. 630.000,00, Belanja Tagihan Air Rp.4.828.650,00, Belanja Tagihan Listrik Rp. 5.883.713,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 14.347.726,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena tagihan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.				
25	3.28.01. 1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	258.154.925	212.512.345	82,32	45.642.580
		Sisa dana sebesar Rp. 45.642.580,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 14.684,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.50.000,00, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 3.668,00, Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 41.587.321,00, Belanja Jasa Tenaga Supir Rp.2.512.539,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp.1.206.024,00 dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp.268.344,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena sisa mati dari penyediaan jasa outsourcing tahun 2022.				
11. UPTD KPHL SIJUNJUNG						

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
26	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	33.266.318	80,70	7.953.682
		Sisa dana sebesar Rp. 7.953.682,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Tagihan Air Rp. 904.000,00, Belanja Tagihan Listrik Rp.2.237.398,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.4.812.284,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena tagihan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.				
12. UPTD KPHL SOLOK						
27	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.070.000	26.723.623	83,33	5.346.377
		Sisa dana sebesar Rp. 5.346.377,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Tagihan Air Rp. 743.700,00, Belanja Tagihan Listrik Rp. 986.716,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 3.615.961,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena tagihan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.				
13. UPTD KPHL HULU BATANG HARI						
28	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.675.264	15.948.388	85,40	2.726.876
		Sisa dana sebesar Rp. 2.726.876,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Tagihan Air Rp. 187.000,00, Belanja Tagihan Listrik Rp. 216.490,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 2.323.386,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena tagihan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.				
15. KPHP PESISIR SELATAN						
29	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.747.501	15.367.126	77,82	4.380.375
		Sisa dana sebesar Rp. 4.380.375,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Tagihan Air Rp. 1.160.500,00, Belanja Tagihan Listrik Rp.1.141.582,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp.2.078.293,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena tagihan yang digunakan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.				
30	3.28.03. 1.04.02.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	837.302.500	724.007.000	86,47	113.295.500
		Sisa dana sebesar Rp. 113.295.500,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 567.400,00, Belanja				

No	Kode Rek	Nama Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Anggaran Rp
		<p>Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 112.696.100,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.30.000,00. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena sumber dana DAK tidak bisa dilakukan perubahan anggaran untuk diperuntukan lain.</p>				
16. KPHP MENTAWAI						
31	3.28.01. 1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.749.500	11.580.950	43,29	15.168.550
		<p>Sisa dana sebesar Rp. 15.168.550,00 merupakan anggaran sisa mati yang berasal dari Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Penyebab realisasi dibawah 90% hal ini disebabkan karena Jumlah anggaran pada rekening kegiatan 1 paket merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa dilakukan pengurangan, sesuai dengan realisasi dan pemasangan instalasi / jaringan internet Kantor baru terpasang pada bulan November 2022 sehingga jumlah anggaran yang ada tetap di siapkan untuk pembayaran biaya pemasangan dan tagihan I pada bulan Desember 2022.</p>				

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi : a) Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, c) Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi : a) Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian; b) Lingkungan akuntansi pemerintahan daerah; c) Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna; d) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; e) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum; f) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsi-prinsip serta kendala informasi akuntansi; g) Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya; h) Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2011 bulan Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi,

Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2022 adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat : a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah , Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman, peralatan dan bahan konstruksi (seperti rangka jembatan, dll yang bisa dibuka pasang). Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Terhadap hewan yang telah dikembangkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
- Biaya rehab terhadap aset renovasi diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengelola Aset Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagai pemilik Aset tetap tersebut. Jika sampai akhir tahun, belum diserahkan dengan dokumen pendukung yang lengkap, maka dicatat pada Aset tetap Renovasi SKPD yang melakukan rehab tersebut.

Namun pada kesempatan pertama di tahun selanjutnya segera untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing pemilik Aset Tetapnya.
 - 2) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan SKPD sendiri tetapi milik SKPD lain dilingkungan Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang yang merehab ke Pengelola dan dilanjutkan ke Pengguna Barang yang memiliki Aset tetap tersebut.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

L. Penyusutan Aset Tetap

- Mulai Tahun 2014 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
- Nilai yang dapat disusutkan adalah :
 - Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
 - Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
 - Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

2. Pengukuran/ Penilaian Kewajiban

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- b) Pendapatan Diterima Dimuka
- c) Utang Beban
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat:

- a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c) Pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran/ Penilaian Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4. Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
- b) Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD
- c) Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5. Pengukuran/ Penilaian Belanja

1. Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengukuran belanja

Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6. Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LO :

- a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

7. Pengukuran/ Penilaian Beban

Pengakuan Beban Pada SKPD

A. Beban Pegawai

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

- 1) Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
- 2) Dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat dicairkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 3) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas

B. Beban Barang

- 1) Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang terangkum dalam surat pengesahan pertanggungjawaban yang disahkan/disetujui oleh PA/KPA.
- 2) Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh penyimpan barang/belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

C. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap lainnya dan aset lainnya. Sedangkan amortisasi dibebankan terhadap aset tidak berwujud.

D. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENDAPATAN LRA

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Pendapatan Asli Daerah LRA	100.000.000,00	56.164.364,00	56,16	40.019.872,00
1	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	56.164.364,00	56,16	40.019.872,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi tahun 2022 mencapai 56,16% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp16.144.492,00. Kenaikan jumlah realisasi anggaran dari tahun sebelumnya untuk pendapatan retribusi daerah (sewa rumah dinas) disebabkan karena meningkatnya jumlah ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang menempati rumah dinas, hal ini menyebabkan jumlah setoran sewa rumah dinas menjadi naik pula. Namun terjadi penurunan realisasi persentase anggaran di bandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan adanya peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya.

Pendapatan ini terdiri dari: 1.1.2.15.001 Penyewaan Tanah dan Bangunan

Penerimaan pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5.1.2. BELANJA

A. BELANJA OPERASI

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Belanja Pegawai	40.009.233.563,00	37.813.865.843,00	94,51	38.184.287.630,00
2	Belanja Barang dan Jasa	45.816.294.983,00	41.021.174.946,52	89,53	33.783.559.912,00
	Jumlah	85.825.528.546,00	78.835.040.789,52	91,86	71.967.847.542,00

1. Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Belanja Pegawai	40.009.233.563,00	37.813.865.843,00	94,51	38.184.287.630

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 94,51% dari anggarannya, dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 terdapat penurunan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 370.421.787,00 (1.06%), hal ini disebabkan karena banyaknya ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang memasuki masa purna tugas. Adapun rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
A	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.962.268.076,00	24.957.145.268,00	96,13	26.200.082.809,00
1	Belanja Gaji Pokok ASN	19.181.352.345,00	18.502.901.779,00	96,46	19.452.624.060,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.915.000.000,00	1.826.306.045,00	95,37	1.997.995.856,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	625.000.000,00	583.139.600,00	93,30	603.070.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.619.060.000,00	1.546.716.090,00	95,53	1.542.330.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	474.500.000,00	441.915.000,00	93,13	421.825.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.065.000.000,00	1.034.085.180,00	97,10	1.113.240.240,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	101.280.776,00	85.189.844,00	84,11	86.485.451,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.380.000,00	250.352,00	18,14	276.252,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	808.400.000,00	784.774.831,00	97,08	822.520.111,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	43.794.955,00	37.966.311,00	86,69	39.933.329,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	122.500.000,00	113.900.236,00	92,98	119.801.304,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.000.000,00	-	-	-
B	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.124.435.487,00	12.046.770.575,00	91,79	11.078.864.821,00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	13.124.435.487,00	12.046.770.575,00	91,79	11.078.864.821,00
C	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	922.530.000,00	809.950.000,00	87,80	905.340.000,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
	ASN				
1	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.000.000,00	-	-	-
2	Belanja Honorarium	893.130.000,00	783.550.000,00	87,73	853.740.000,00
3	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	51.600.000,00
	JUMLAH	40.009.233.563,00	37.813.865.843,00	94,51	38.184.287.630,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 dan 2021. Saldo/ jumlah belanja pegawai tidak tersebut diatas adalah jumlah netto, setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2022 sejumlah RP.2.453.833,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Pengembalian belanja pegawai tidak langsung An. Sardi Budiman	03-02-2022	408.750,00
2	Pengembalian belanja pegawai tidak langsung An. Edy Syafnir	31-03-2022	83,00
3	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Umum PNS tahun 2022 An. Yunimar, S.Sos	01-07-2022	185.000,00
4	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun 2022 An, Febri Syahli, S.Hut	01-07-2022	540.000,00
5	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS tahun 2022 An. Alfiantoni	01-07-2022	780.000,00
6	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun 2022 An. Ismet Fanani, S.Hut	01-07-2022	540.000,00

2. Belanja Barang & Jasa

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2	Belanja Barang dan Jasa	45.816.294.983,00	41.021.174.946,52	89,53	33.783.559.912,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi tahun 2022 mencapai 89,53% dari anggarannya dan sisa anggaran belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp 4.795.120.036,48. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp.7.237.615.034,52.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
I	Belanja Barang	21.105.060.109,00	18.179.503.762,52	86,14	2.925.556.346,48
A	Belanja Barang Pakai Habis	21.104.804.359,00	18.179.248.012,52	86,14	2.925.556.346,48
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	157.514.105,00	108.628.890,00	68,96	48.885.215,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	641.953.220,00	321.343.725,00	50,06	320.609.495,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	898.846.521,00	777.518.358,00	86,50	121.328.163,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	45.113.664,00	29.054.676,00	64,40	16.058.988,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.394.871.193,00	2.003.966.650,00	59,03	1.390.904.543,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	57.250.740,00	57.141.060,00	99,81	109.680,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.007.968,00	75.516.550,00	94,39	4.491.418,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	157.414.400,00	152.938.800,00	97,16	4.475.600,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	558.349.009,00	532.183.568,00	95,31	26.165.441,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	58.851.000,00	58.849.000,00	100,00	2.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	200.028.500,00	198.576.700,00	99,27	1.451.800,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	105.000,00	105.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	150.265.000,00	150.165.000,00	99,93	100.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	76.085.500,00	73.910.500,00	97,14	2.175.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	56.901.000,00	56.901.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	294.741.199,00	246.800.380,00	83,73	47.940.819,00
17	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.731.400,00	2.731.400,00	100,00	0,00
18	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.426.590.180,00	11.605.278.052,52	93,39	821.312.127,48
19	Belanja Natura dan Pakan-Natura	49.950.000,00	49.900.050,00	99,90	49.950,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	542.669.760,00	484.402.000,00	89,26	58.267.760,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.390.000,00	14.390.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	431.525.000,00	398.866.000,00	92,43	32.659.000,00
23	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	304.500.000,00	28.9347.085,00	95,02	15.152.915,00
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	111.700.000,00	111.700.000,00	100,00	0,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
25	Belanja Pakaian Batik Tradisional	305.250.000,00	291.833.568,00	95,60	13.416.432,00
26	Belanja Pakaian Olahraga	87.200.000,00	87.200.000,00	100,00	0,00
B	Belanja Barang Tak Habis Pakai	255.750,00	255.750,00	100,00	0,00
1	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	255.750,00	255.750,00	100,00	0,00
II	Belanja Jasa	11.586.252.162,00	10.275.593.993,00	88,69	1.310.658.169,00
A	Belanja Jasa Kantor	9.549.172.926,00	8.360.117.237,00	87,55	1.189.055.689,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	836.403.600,00	722.210.000,00	86,35	114.193.600,00
2	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
3	Honorarium Rohaniwan	45.400.000,00	44.300.000,00	97,58	1.100.000,00
4	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	7.250.000,00	7.125.000,00	98,28	125.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	750.000,00	675.000,00	90,00	75.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.423.500.000,00	3.632.184.300,00	82,11	791.315.700,00
7	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	223.065.056,00	203.975.840,00	91,44	19.089.216,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.750.000,00	20.750.000,00	95,40	1.000.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	691.313.812,00	688.782.051,00	99,63	2.531.761,00
10	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	919.957.163,00	797.710.407,00	86,71	122.246.756,00
11	Belanja Jasa Tenaga Supir	504.049.476,00	501.317.717,00	99,46	2.731.759,00
12	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.303.200,00	1.600.000,00	37,18	2.703.200,00
14	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.500.000,00	1.200.000,00	48,00	1.300.000,00
15	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	939.920.000,00	939.920.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	54.000.000,00	34.500.000,00	63,89	19.500.000,00
17	Belanja Tagihan Telepon	7.510.621,00	4.340.420,00	57,79	3.170.201,00
18	Belanja Tagihan Air	49.093.100,00	40.986.150,00	83,49	8.106.950,00
19	Belanja Tagihan Listrik	354.170.809,00	336.564.142,00	95,03	17.606.667,00
20	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	84.360.600,00	83.280.000,00	98,72	1.080.600,00
21	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	221.847.821,00	163.352.317,00	73,63	58.495.504,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
22	Belanja Paket/Pengiriman	655.668,00	540.000,00	82,36	115.668,00
23	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	88.500.000,00	71.187.893,00	80,44	17.312.107,00
24	Belanja Lembur	55.272.000,00	50.016.000,00	90,49	5.256.000,00
B	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	238.450.236,00	195.618.765,00	82,04	42.831.471,00
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.236.144,00	1.268.000,00	17,52	5.968.144,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.414.092,00	201.258,00	14,23	1.212.834,00
3	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	229.800.000,00	194.149.507,00	84,49	35.650.493,00
C	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	216.352.000,00	188.952.000,00	87,34	27.400.000,00
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	104.850.000,00	87.950.000,00	83,88	16.900.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	28.500.000,00	18.000.000,00	63,16	10.500.000,00
3	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	42.592.000,00	42.592.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.460.000,00	19.460.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Sewa Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	0,00
D	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	132.225.000,00	118.969.000,00	89,97	13.256.000,00
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	1.000.000,00
2	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	70.625.000,00	63.000.000,00	89,20	7.625.000,00
3	Belanja Sewa Hotel	11.600.000,00	6.969.000,00	60,08	4.631.000,00
E	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	344.002.000,00	335.386.991,00	97,50	8.615.009,00
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	115.632.000,00	108.601.300,00	93,92	7.030.700,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	73.410.000,00	71.825.691,00	97,84	1.584.309,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
4	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	144.960.000,00	144.960.000,00	100,00	0,00
F	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.106.050.000,00	1.076.550.000,00	97,33	29.500.000,00
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	815.000.000,00	796.750.000,00	97,76	18.250.000,00
2	Belanja Sosialisasi	177.450.000,00	166.200.000,00	93,66	11.250.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	113.600.000,00	113.600.000,00	100,00	0,00
III	Belanja Pemeliharaan	2.297.839.885,00	2.248.862.833,00	97,87	48.977.052,00
G	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	738.800.000,00	691.874.875,00	93,65	46.925.125,00
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	560.160.000,00	560.149.875,00	100,00	10.125,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	50.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.140.000,00	22.950.000,00	53,20	20.190.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	13.500.000,00	12.580.000,00	93,19	920.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	85.600.000,00	59.845.000,00	69,91	25.755.000,00
H	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.559.039.885,00	1.556.987.958,00	99,87	2.051.927,00
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.529.159.885,00	1.527.107.958,00	99,87	2.051.927,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	29.880.000,00	29.880.000,00	100,00	0,00
IV	Belanja Perjalanan Dinas	10.754.512.827,00	10.248.524.358,00	95,30	505.988.469,00
I	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.754.512.827,00	10.248.524.358,00	95,30	505.988.469,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.576.040.827,00	10.091.994.358,00	95,42	484.046.469,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	15.200.000,00	-	-	15.200.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.150.000,00	38.440.000,00	89,08	4.710.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.050.000,00	33.450.000,00	98,24	600.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	86.072.000,00	84.640.000,00	98,34	1.432.000,00
V	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.630.000,00	68.690.000,00	94,58	3.940.000,00
J	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.630.000,00	68.690.000,00	94,58	3.940.000,00
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	65.250.000,00	65.250.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	7.380.000,00	3.440.000,00	46,61	3.940.000,00
	JUMLAH	45.816.294.983,00	41.021.174.946,52	91,86	4.795.120.036,48

B. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
	Belanja Modal	1.625.567.114,00	1.580.287.712,00	97,21	1.972.143.750,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 97.21% dari anggarannya. Sisa belanja modal adalah sebesar Rp45.279.402,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp391.856.038,00 disebabkan karena berkurangnya anggaran belanja modal tahun 2022. Belanja modal ini terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal asset tetap lainnya.

Adapun daftar rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.386.200.250,00	1.341.620.819,00	96,78	693.534.750,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.276.864,00	235.576.893,00	99,70	1.278.609.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00	-
	JUMLAH	1.625.567.114,00	1.580.287.712,00	97,21	1.972.143.750,00

B.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.386.200.250,00	1.341.620.819,00	96,78	693.534.750,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 96.78% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat penambahan sebesar Rp648.086.069,00.

Adapun rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
A	Belanja Modal Alat Bantu	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1	Belanja Modal Pompa	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
B	Belanja Modal Alat Ukur	69.750.000,00	69.597.000,00	99,78	153.000,00
1	Belanja Modal Alat Ukur Universal	69.750.000,00	69.597.000,00	99,78	153.000,00
C	Belanja Modal Alat Kantor	47.878.000,00	47.737.500,00	99,70	20.329.332,00
1	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40.378.000,00	40.237.500,00	99,65	140.500,00
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
D	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	452.251.600,00	433.121.800,00	95,77	19.129.800,00
1	Belanja Modal Mebel	310.554.600,00	291.666.800,00	93,92	18.887.800,00

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
2	Belanja Modal Alat Pendingin	136.697.000,00	136.455.000,00	99,82	242.000,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
E	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	69.067.400,00	68.008.368,00	98,47	1.059.032,00
1	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	64.482.000,00	63.435.168,00	98,38	1.046.832,00
2	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.585.400,00	4.573.200,00	99,73	12.200,00
F	Belanja Modal Alat Studio	31.350.000,00	31.252.500	99,69	97.500,00
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	25.350.000,00	25.252.500,00	99,62	97.500,00
G	Belanja Modal Komputer Unit	400.554.800,00	398.879.800,00	99,58	1.675.000,00
1	Belanja Modal Personal Computer	400.554.800,00	398.879.800,00	99,58	1.675.000,00
H	Belanja Modal Peralatan Komputer	152.128.700,00	138.626.625,00	91,12	13.502.075,00
1	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	152.128.700,00	138.626.625,00	91,12	13.502.075,00
I	Belanja Modal Alat Pelindung	819.750,00	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	819.750,00	0,00	0,00	0,00
J	Belanja Modal Alat SAR	154.400.000,00	154.397.226,00	100,00	2.774,00
1	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	154.400.000,00	154.397.226,00	100,00	2.774,00
	JUMLAH	1.386.200.250,00	1.341.620.819,00	96,78	44.579.431,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 dan tahun 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 96.78% dari anggarannya, sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 adalah Rp.44.579.431,00.

Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

B.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.276.864,00	235.576.893,00	99,70	1.278.609.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 99.70% dari anggarannya.

Adapun rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Sisa Anggaran
A	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	236.276.864,00	235.576.893,00	99,70	699.971,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	236.276.864,00	235.576.893,00	99,70	699.971,00
	JUMLAH	236.276.864,00	235.576.893,00	99,70	699.971,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 dan tahun 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 99.70% dari anggarannya, sisa anggaran belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 adalah Rp.699.971,00.

Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21.

B.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Tahun 2021
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 100% dari anggarannya.

Adapun rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Sisa Anggaran
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00	0,00
1	Belanja Modal Buku Umum	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00	0,00

Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.2. PENJELASAN NERACA

5.2.1. Aset

5.2.1.1. Aset Lancar

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Beban Barang Dibayar Dimuka		
Beban Jasa Dibayar Dimuka		
Persediaan	375.184.423,00	266.567.320,00
Jumlah Aset Lancar	375.184.423,00	266.567.320,00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD sebesar Rp.397.841.452,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp.397.841.452,00, dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-. Semua pengembalian pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran		27,579.200.639.00	27,579.200.639.00	-

Penambahan adalah penerimaan Uang Persediaan (UP) dan penerimaan SP2D GU tahun anggaran 2022. Penerimaan Uang Persediaan sebesar Rp 3.112.589.000,00 merupakan Uang Persediaan (UP) Rp3.112.589.000,- tanggal 10 Februari 2022. Sementara, total penerimaan SP2D GU Tahun 2022 sebesar Rp.24.466.611.639,-.

Pengeluaran adalah belanja langsung berdasarkan pengesahan spj bulan Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp27.181.359.187,- (Jumlah SP2D GU dan GU Nihil) dan penyetoran sisa UYHD ke kas daerah sebesar Rp397.841.452,- pada tanggal 30 Desember 2022.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	-	56.164.364,00	56.164.364,00	-

Penambahan adalah jumlah pendapatan/penerimaan sewa rumah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp.56.164.364,-.

Pengurangan adalah sejumlah pendapatan yang disetorkan ke kas daerah setiap awal bulannya.

3. Beban Dibayar Dimuka

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Beban dibayar dimuka	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka		-	-	-

Tidak ada penambahan beban dibayar dimuka/beban jasa premi asuransi BMD maupun pengurangan selama tahun 2022.

Daftar beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 11.

4. Persediaan

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Persediaan	375.184.423,00	266.567.320,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Barang Pakai Habis	143.114.200,00	285.984.445,00	75.955.990,00	266.567.320,00
A. Bahan				
1. Bahan Bakar dan Pelumas	6.385.000,00	3.565.000,000		9.950.000,00
2. Bahan/Bibit Tanaman		43.693.953,000		43.693.953,00
B. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
1. Alat Tulis Kantor	67.982.770,00	14.123.040,000	51.765.940,00	30.339.870,00
2. Kertas dan Cover	12.669.700,00		9.745.600,00	2.924.100,00
3. Bahan Cetak	68.727.200,00	14.557.850,000	14.444.450,00	68.840.600,00
4. Alat Listrik	110.802.650,00	78.481.250,000		189.283.900,00
5. Benda Pos		7.160.000,000		7.160.000,00
C. Persediaan Dalam Proses				
1. Persediaan Dalam Proses Lainnya		22.992.000,000		22.992.000,00
Total Persediaan	266.567.320,00	184.573.093,00	75.955.990,00	375.184.423,00

Daftar persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16

5.2.1.2 ASET TETAP

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Tanah	34.549.439.763,00	34.549.439.763,00
Peralatan dan Mesin	48.166.790.223,42	47.738.003.441,00
Gedung dan Bangunan	22.573.353.572,00	21.426.262.411,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	62.696.000,00	59.606.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.030.000,00	9.030.000,00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.488.507.987,45)	(38.333.205.319,11)
Akm, Penyusutan Gdg dan Bangunan	(5.988.153.522,28)	(5.473.643.870,83)
JUMLAH ASET TETAP	57.884.648.048,69	59.975.492.425,06

5. TANAH

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Tanah	34.549.439.763,00	34.549.439.763,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp 31.787.880.000,00
b. Harga Prolehan 2006 s/d 2022	Rp 2.741.159.763,00
c. Appraisal 2011	Rp -
d. Appraisal 2012	Rp -
e. Appraisal 2013	Rp -
f. Appraisal 2014	Rp -
g. Appraisal 2015	Rp -
h. Appraisal 2016	Rp 20.400.000,00
i. Appraisal 2017	Rp -
j. Appraisal 2018	Rp -
Sub Jumlah	Rp 34.549.439.763,00

Daftar Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	34,549,439,763.00	-	-	34,549,439,763.00

Saldo Audited 2021	34.549.439.763,00
Mutasi Tambah	
-Hibah dari Kabupaten/Kota	-
Total Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2022	34.549.439.763,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset tetap tanah pada Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2022.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2022, dapat dilihat pada Lampiran 17.

6. PERALATAN DAN MESIN

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Peralatan dan Mesin	48.166.790.223,42	47,738,003,441.00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp	1.011.993.337,40
b. Harga Prolehan 2006 s/d 2022	Rp	47.154.796.886,02
c. Appraisal 2011	Rp	-
d. Appraisal 2012	Rp	-
e. Appraisal 2013	Rp	-
f. Appraisal 2014	Rp	-
g. Appraisal 2015	Rp	-
h. Appraisal 2016	Rp	-
i. Appraisal 2017	Rp	-
j. Appraisal 2018	Rp	-
Sub Jumlah	Rp	48.166.790.223,42

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	47.738.003.441,00	1.341.620.819,00	(912.834.036,58)	48.166.790.223,42
Akum Peny Peralatan dan Mesin	(38.333.205.885,92)	(4.005.826.704,92)	850.524.036,58	(41.488.507.987,45)
Nilai Buku	9.404.798.121,89	(2.664.205.885,92)	(62.310.000,00)	6.678.282.235,97

Saldo Audited 2021	47.738.003.441,00
Mutasi Tambah	
-Belanja Modal Tahun 2022	1.341.620.819,00
Total Mutasi Tambah	1.341.620.819,00
Mutasi Kurang	
-Belanja Modal Tidak Dikapitalisir	62.310.000,00
-Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat	850.524.036,58
Total Mutasi Kurang	(912.834.036,58)
Total Mutasi	428.786.782,42
Saldo per 31 Desember 2022	48.166.790.223,42

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.341.620.819,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Mutasi kurang karena adanya belanja modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp.62.310.000,00 yaitu pembelian belanja modal yang nilai satuannya dibawah Rp.1.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Kursi Kerja Pegawai		67	2022	62.310.000,00	-
	Total				62.310.000,00	-

- b. Mutasi kurang karena direklas ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp.850.524.036,58 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Aset Tidak Bermanfaat		401	1990 -2016	850.524.036,58	850.524.036,58
	Total				850.524.036,58	850.524.036,58

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17

7. GEDUNG DAN BANGUNAN

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Gedung dan Bangunan	22.573.353.572,00	21.426.262.411,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp 2.436.447.000,00
b. Harga Prolehan 2006 s/d 2022	Rp 19.353.207.052,00
c. Appraisal 2011	Rp 536.260.000,00
d. Appraisal 2012	Rp -
e. Appraisal 2013	Rp -
f. Appraisal 2014	Rp -
g. Appraisal 2015	Rp -
h. Appraisal 2016	Rp 247.439.520,00
i. Appraisal 2018	Rp -
Sub Jumlah	Rp 22.573.353.572,00

Daftar gedung dan bangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	21.426.262.411,00	1.163.283.161,00	16.192.000,00	22.573.353.572,00
Akum. Peny Gdg dan Bgn	(5.473.643.870,83)	(514.509.651,45)	-	(5.988.153.522,28)
Nilai Buku	15.952.618.540,17	648.773.509,55	16.192.000,00	16.585.200.049,72

Saldo Audited 2021	21.426.262.411,00
Mutasi Tambah	
-Belanja Modal Tahun 2022	235.576.893,00
-Belanja Barang & Jasa yang Dikapitalisir Tahun 2022	927.706.268,00
Total Mutasi Tambah	1.163.283.161,00
Mutasi Kurang	
-Reklas ke Persediaan	16.192.000,00
Total Mutasi Kurang	16.192.000,00
Total Mutasi	1.147.091.161,00
Saldo per 31 Desember 2022	22.573.353.572,00

Penjelasan Mutasi Tambah :

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.235.576.893,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- b. Belanja barang dan jasa yang dikapitalisir senilai Rp.927.706.268,00 dengan perincian sebagai berikut :
- c.

No	Nama Barang	Jml (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Kantor KPHP Mentawai	1	2022	45.000.000,00	
2	DED Pembangunan Saprass Wisata Alam Jalan Tracking Puncak Paku	1	2022	3.680.000,00	
3	DED Pembangunan Saprass Wisata Alam Mangrove Trail Pantai Sambungo	1	2022	12.512.000,00	
4	Pemeliharaan Rumah Dinas Gunung Pangilun	1	2022	56.918.907,00	
5	Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas (Toilet)	1	2022	90.000.000,00	
6	Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas (Ruang	1	2022	174.903.000,00	

No	Nama Barang	Jml (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
	Kepala Dinas)				
7	Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas (Ruang Lobi)	1	2022	122.235.000,00	
8	Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas (Aula)	1	2022	74.784.296,00	
9	Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas (Ruang Pengamanan Senjata)	1	2022	54.797.000,00	
10	Belanja Pemeliharaan Kantor Dinas	1	2022	191.348.972,00	
11	Bangunan Gedung Kantor Pemanen, Jl. Raden Saleh No. 8 A, Kel. Flamboyan, Kec. Padang Barat, Kota Padang (Gedung Kantor UPTD BSPTH)	1	2022	128.566.000,00	
12	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas KDK (Teralis)	1	2022	29.880.000,00	
	TOTAL			927.706.268,00	

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Mutasi kurang karena adanya reklas dari aset Gedung dan bangunan ke aset Persediaan, yaitu Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi – serta Struktur Bangunan pada UPTD KPHP Pesisir Selatan tahun 2022 senilai Rp 16.192.000,00.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17

8. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jalan, irigasi dan Jaringan	-			-

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Jalan Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

9. ASET TETAP LAINNYA

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	62.696.000,00	59.606.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp	-
b. Harga Prolehan 2006 s/d 2022	Rp	62.696.000,00
c. Appraisal 2011	Rp	-
d. Appraisal 2012	Rp	-
e. Appraisal 2013	Rp	-
f. Appraisal 2014	Rp	-
g. Appraisal 2015	Rp	-
h. Appraisal 2016	Rp	-
i. Appraisal 2018	Rp	-
Sub Jumlah	Rp	62.696.000,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	59.606.000,00	9.890.000,00	(6.800.000,00)	62.696.000,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	59.606.000,00	9.890.000,00	(6.800.000,00)	62.696.000,00

Saldo Audited 2021	59.606.000,00
Mutasi Tambah	
-Belanja Modal Tahun 2022	3.090.000,00
-Belanja Barang & Jasa yang yang Dikapitalisir Tahun 2022	6.800.000,00
Total Mutasi Tambah	9.890.000,00
Mutasi Kurang	
-Reklas ke Persediaan	6.800.000,00
Total Mutasi Kurang	6.800.000,00
Total Mutasi	3.090.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	62.696.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah :

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 3.090.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- b. Belanja barang dan jasa yang dikapitalisir pada Semester 1 Tahun 2022 senilai Rp. 6.800.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jml (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta di KPHL Pasaman Raya	4	2022	3.520.000,00	
2	Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta di KPHP Pesisir Selatan	1	2022	880.000,00	
3	Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta di KPHL Hulu Batang Hari	4	2022	1.920.000,00	
4	Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta di KPHL Lima Puluh Kota	1	2022	480.000,00	
	TOTAL			6.800.000,00	

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Mutasi kurang karena belanja modal aset tetap lainnya yang direklas ke persediaan senilai Rp.6.800.000,00

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.

10. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.030.000,00	9.030.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

a) Dasar penilaian

Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp9.030.000,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022.

b) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.030.000,00	-	-	9.030.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022.

11. AKUMULASI PENYUSUTAN

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Akumulasi Penyusutan	(47.476.661.509,73)	(43.806.849.189,94)

Terdiri dari :

Uraian	2022	2021 (Audited)
Akum. Penyusutan Peralatan & Mesin	(41.488.507.987,45)	(38.333.205.319,11)
Akum. Penyusutan Gdg dan Bangunan	(5.988.253.522,28)	(5.473.643.870,83)
Jumlah	(47.476.661.509,73)	(43.806.849.189,94)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.333.205.319,11)	(4.005.826.704,92)	850.524.036,58	(41.488.507.987,45)
Akm. Penyusutan Gedung dan Bgn	(5.473.643.870,83)	(514.509.651,45)	-	(5.988.153.522,28)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(43.806.849.189,94)	(4.520.336.356,37)	850.524.036,58	(47.476.661.509,73)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
Saldo Akum. Penys Per 31-12-202 (Audited)	(38.333.205.319,11)	(5.473.643.870,83)
- Jumlah koreksi tambah	(4.005.826.704,92)	(514.509.651,45)
a. Beban Penyusutan Tahun 2022	(4.005.826.704,92)	(514.509.651,45)
b. Mutasi antar SKPD	-	-
c. Reklasifikasi		
d. Koreksi nilai		
- Jumlah koreksi Kurang	850.524.036,58	-
a. Koreksi nilai		
b. Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat	850.524.036,58	
- Beban Penyusutan tahun 2022	(3.155.302.668,34)	(514.509.651,45)
- Saldo akhir akm penyusutan per 31-12- 2022	(41.488.507.987,45)	(5.988.153.522,28)

Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan

I. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan

A. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

- a) Beban penyusutan aset peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp4.005.826.704,92

B. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

- a) Beban penyusutan aset gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp514.509.651,45

II. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan

A. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

- a) Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat tahun 2022 sebesar Rp. 850.524.036,58.

B. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan selama tahun 2022.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2022	2021
Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00
Akum. Amortisasi Aset Tdk Berwujud	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
Aset Lain-Lain		
-Aset Tidak Bermanfaat	3.102.773.689,85	2.252.249.653,27
-Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	62.600.000,00	62.600.000,00
Akm Penys Aset Tidak Bermanfaat	(3.055.450.422,65)	(2.202.142.664,47)
Akm Penys Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	(47.642.000)	(46.390.000)
JUMLAH ASET LAINNYA	62.281.267,20	66.316.988,80

12. ASET TIDAK BERWUJUD

Perkiraan	2022	2021
Aset Tidak Berwujud	6.000.00,00	6.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 6.000.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Akumulasi Amortisasi	(6.000.000,00)	-	-	(6.000.000,00)
Nilai Buku	-	-	-	-

Selama tahun 2022 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset tidak berwujud.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

13. AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2022 dan 2021, tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Sebagaimana penjelasan uraian berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.000.000,00)	-	-	(6.000.000,00)

Uraian	Nilai
Saldo Akm Amortisasi Per 31 Des 2021 (Audited)	(6.000.000,00)
• Jumlah Koreksi Tambah:	-
• Jumlah Koreksi Kurang:	-
• Beban Amortisasi Tahun 2022	-
• Saldo Akhir Akm Amortisasi Per 31 Des 2022	(6.000.000,00)

14. ASET LAIN-LAIN

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Aset Lain-Lain	2.314.849.653,27	2.314.849.653,27

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	2.252.249.653,27	850.524.036,58	-	3.102.773.689,85
Aset Dipakai Pihak Lain	62.600.000,00	-	-	62.600.000,00
Jumlah	2.314.849.653,27	850.524.036,58	-	3.165.373.689,85

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 3.102.773.689,85 dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp 62.600.000,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Aset Tidak Bermanfaat	3.102.773.689,85	2.252.249.653,27

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 3.102.773.689,85 tersebut dicatat sebesar nilai perolehan per 31 Desember 2022.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	2.252.249.653,27	850.524.036,58	-	3.102.773.689,85
Akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat	(2.202.142.664,47)	(853.307.758,18)	-	(3.055.450.422,65)
Nilai Buku	50.106.988,80	(2.783.721,60)	-	71.808.235,34

Saldo Audited 2021	2.252.249.653,27
Mutasi Tambah	
-Reklas dari peralatan dan mesin	850.524.036,58
Total Mutasi Tambah	850.524.036,58
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	850.524.036,58
Saldo per 31 Desember 2022	3.102.773.689,85

Penjelasan Mutasi Tambah :

- a. Mutasi tambah karena adanya reklas dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp 850.524.036,58, yaitu aset peralatan dan mesin yang masa manfaatnya sudah habis per 31 Desember 2022

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

-Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang akumulasi aset tidak bermanfaat :

Saldo Audited 2021	2.202.142.664,47
<u>Mutasi Tambah</u>	
-Reklas dari peralatan dan mesin	850.524.036,58
-Beban Penyusutan	2.783.721,60
Total Mutasi Tambah	853.307.758,18
<u>Mutasi Kurang</u>	
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	853.307.758,18
Saldo per 31 Desember 2022	3.055.450.422,65

Penjelasan Mutasi Tambah :

- a. Mutasi tambah karena adanya reklas dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp 850.524.036,58.
- b. Beban penyusutan aset tidak bermanfaat tahun 2022 sebesar Rp 2.783.721,60.

Penjelasan Mutasi Kurang :

Tidak terdapat mutasi kurang untuk akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat selama tahun 2022

2) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Perkiraan	2022	2021 (audited)
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	62.600.000,00	62.600.000,00

Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp.62.600.000,00 dicatat berdasarkan nilai neraca awal 2005 Rp62.600.000,- dengan mutasi sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	62,600,000.00			62,600,000.00

Saldo Audited 2020	62.600.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	-
<u>Mutasi Kurang</u>	-
Saldo per 31 Desember 2021	62.600.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Dimanfaatkan Pihak Lain per 31 Desember 2021.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.2.2 KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2022	2021
Kewajiban Jangka Pendek	31.911.822,00	17.884.353,00

15. Utang Belanja

Perkiraan	2022	2020
Utang Belanja	31.911.822,00	17.884.353,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021. Utang tersebut merupakan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang belanja barang dan Jasa Rp 31.911.822,00**

Yaitu utang belanja telp, air, listrik dan fax/internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 dan akan dibayarkan tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	17.884.353,00	31.911.822,00	17.884.353,00	31.911.822,00

Penambahan sebesar Rp 31.911.822,00 adalah utang belanja telp, air, listrik tahun 2022 terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp 235.924,-, Tagihan Air Rp.5.234.100,-, tagihan listrik Rp.26.440.998,-.

Pengurangan sebesar Rp17.884.353,00 adalah pelunasan utang belanja telp, air, listrik tahun 2021.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

5.2.3 EKUITAS

16. Ekuitas

Perkiraan	2022	2021 (Audited)
Ekuitas	58.290.201.916,89	60.290.492.380,86

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:

Ekuitas	60.290.492.380,86
Surplus/Defisit LO	-82.297.144.601,49
Perubahan SAL	80.359.164.137,52
Surplus/Defisit LRA	-80.359.164.137,52
RK PPKD	80.359.164.137,52
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-62.310.000,00
Ekuitas Akhir	58.290.201.916,89

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2022	2021
Pendapatan-LO	56.164.364,00	40.019.872,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, maka terdapat peningkatan sebesar Rp.16.144.492,-

Pendapatan ini terdiri dari:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO

Perkiraan	2022	2021
Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	56.164.364,00	40.019.872,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan Retribusi Daerah	56.164.364,00	56.164.364,00	-

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2022	2021
Beban Pegawai	37.813.865.843,00	38.184.287.630,00
Beban Barang dan Jasa	40.015.071.044,52	33.089.451.307,00
Beban Hibah	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.524.372.077,97	4.760.319.882,90
Beban Operasi-LO	82.353.308.965,49	76.034.058.819,90

a. Beban Pegawai

Perkiraan	2022	2021
Beban Pegawai	37.813.865.843,00	38.184.287.630,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO dan Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Perkiraan	2022	2021
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	24.957.145.268,00	26.200.082.809,00
Beban Gaji Pokok ASN	18.502.901.779,00	19.452.624.060,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.826.306.045,00	1.997.995.856,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	583.139.600,00	603.070.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.546.716.090,00	1.542.330.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	441.915.000,00	421.825.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.034.085.180,00	1.113.240.240,00

Perkiraan	2022	2021
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	85.189.844,00	86.485.451,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	250.352,00	257.458,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	784.774.831,00	822.520.111,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.966.311,00	39.933.329,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	113.900.236,00	119.801.304,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.046.770.575,00	11.078.864.821,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.046.770.575,00	11.078.864.821,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	809.950.000,00	905.340.000,00
Beban Honorarium	783.550.000,00	853.740.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	26.400.000,00	51.600.000,00
Beban Pegawai – LO	37.813.865.843,00	38.184.287.630,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto, serta ada pengembalian belanja pegawai selama tahun 2022 sejumlah RP. 2.453.833,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Pengembalian belanja pegawai tidak langsung An. Sardi Budiman	03-02-2022	408.750,00
2	Pengembalian belanja pegawai tidak langsung An. Edy Syafnir	31-03-2022	83,00
3	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Umum PNS tahun 2022 An. Yunimar, S.Sos	01-07-2022	185.000,00
4	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun 2022 An, Febri Syahli, S.Hut	01-07-2022	540.000,00
5	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS tahun 2022 An. Alfiantoni	01-07-2022	780.000,00
6	Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun 2022 An. Ismet Fanani, S.Hut	01-07-2022	540.000,00

Adapun perbedaan jumlah belanja pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih + /-
-Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.957.145.268,00	24.957.145.268,00	-
- Tambahan Penghasilan PNS	12.046.770.575,00	12.046.770.575,00	
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	809.950.000,00	809.950.000,00	-
Jumlah	37.813.865.843,00	37.813.865.843,00	-

Penjelasan selisih: tidak terdapat selisih antara belanja pegawai LRA dengan beban pegawai LO.

b. Beban Barang & Jasa

Perkiraan	2022	2021
Beban Barang dan Jasa	40.015.071.044,52	33.089.451.307,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Perkiraan	2022
Beban Barang	18.093.878.659,52
Beban Barang Pakai Habis	18.093.622.909,52
Beban Barang Tak Habis Pakai	255.750,00
Beban Jasa	10.266.629.462,00
Beban Jasa Kantor	8.374.144.706,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	195.618.765,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	188.952.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	118.969.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	312.394.991,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.076.550.000,00

Perkiraan	2022
Beban Pemeliharaan	1.337.348.565,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	691.874.875,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	645.473.690,00
Beban Perjalanan Dinas	10.248.524.358,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.248.524.358,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.690.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.690.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.524.372.077,97
Jumlah Beban Barang dan Jasa	40.015.071.044,52

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto dan tidak terdapat pengembalian beban barang dan jasa tahun 2022.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Belanja Brg&Jasa LO	Selisih +/-
A. Belanja Barang Pakai Habis	18.179.248.012,52	18.093.622.909,52	85.625.103,00
B. Belanja Barang Tak Habis Pakai	255.750,00	255.750,00	-
C. Belanja Jasa Kantor	8.360.117.237,00	8.374.144.706,00	- 14.027.469,00
D. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	195.618.765,00	195.618.765,00	-
E. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	188.952.000,00	188.952.000,00	-
D. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	118.969.000,00	118.969.000,00	-
E. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	335.386.991,00	312.394.991,00	22.992.000,00
F. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.076.550.000,00	1.076.550.000,00	-
H. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	691.874.875,00	691.874.875,00	-
I. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.556.987.958,00	645.473.690,00	911.514.268,00
J. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.248.524.358,00	10.248.524.358,00	-

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Belanja Brg&Jasa LO	Selisih +/-
L. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.690.000,00	68.690.000,00	-
JUMLAH	41.021.174.946,52	40.015.071.044,52	1.006.103.902,00

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
- Belanja Brg Pakai Habis	114.788.425	1.733.900	46.792.668	74.222.090	85.625.103	

- Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 yaitu untuk pemakaian listrik, telp dan air bulan Desember 2022 yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
-Belanja Tagihan Telepon	240.550,00			235.924,00	4.626	
- Belanja Tagihan Air	2.278.700,00			5.234.900,00	(2.956.200)	
- Belanja Tagihan Listrik	15.365.103,00			26.440.998,00	(11.075.895)	
Jumlah	17.884.353			31.911.822	(14.027.469)	

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi gedung kantor dan kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
- Belanja Premi Asuransi BMD			97.074.753,52	97.074.753,52	-	

- Penyesuaian pengakuan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi belanja modal Gedung dan bangunan

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
- Blj Jasa Konsultasi Konstruksi	22.992.000,00				22.992.000,00	
- Blj Pemeliharaan Gedung dan Bgn	45.000.000,00		866.514.268,00		911.514.268,00	

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Perkiraan	2022	2021
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.524.372.077,97	4.751.156.79,63

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.005.826.704,92
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	514.509.651,45
3.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.035.721,00
		4.524.372.077,37

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 29. (2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2022

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2022	2021
Ekuitas Akhir	58.290.201.916,89	60.290.492.380,86

1	Ekuitas Awal	60.290.492.380,86	62.413.968.795,03
2	Koreksi Ekuitas	- 62.310.000,00	- 29.408.886,27
	- Koreksi Utang Tahun Lalu		- 4.043.013,00
	- Mutasi Tambah /Kurang Aset Tetap	- 62.310.000,00	- 25.365.873,27
3	RK PPKD	80.359.164.137,52	73.899.971.420,00
4	Surplus/Defisit/LO	- 82.297.144.601,49	- 75.994.038.947,90
5	Ekuitas Akhir	58.290.201.916,89	60.290.492.380,86

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp60.290.492.380,86 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca (audited) per 31 Desember 2021.
2. Surplus/Defisit LO sebesar (82.297.144.601,49) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022
3. RK PPKD sebesar Rp80.359.164.137,52,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, yaitu :
 - Mutasi kurang Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp62.310.000,00 terdiri atas :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja modal tidak dikapitalisir Terdiri dari : Belanja modal kursi kerja pegawai (67 unit x Rp.930.000) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	62.310.000,00
	Jumlah	62.310.000,00

5. Ekuitas Akhir sebesar Rp.58.290.201.916,89 adalah saldo Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
- Pendapatan Pajak			
- Pendapatan Retribusi	54.164.364,00	54.164.364,00	-
- Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan	54.164.364,00	54.164.364,00	-
Belanja Operasi			
- Belanja Pegawai	37.813.865.843,00	37.813.865.843,00	-
- Belanja Brg & Jasa	41.021.174.946,52	40.015.071.044,52	1.066.103.902,00
- Belanja Hibah	-	-	-
- Belanja Modal	1.580.287.712,00		1.580.287.712,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi		4.524.372.077,97	(4.524.372.077,97)
- Beban Penyisihan Piutang			
Jumlah Beban Operasi	80.415.328.501,52	82.353.308.965,49	(1.937.980.463,97)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di Bidang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Bidang (UPTD) (sesuai surat Kementerian Dalam Negeri RI No.061/4336/UTI.A tanggal 12 Juni 2017 dan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. Maswal Noor, M.Si)
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Anggaran
- b. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE (Ir. MGO Senatung, MP)
 - Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan (Sayogo Hutomo, S.Hut, MP)
 - Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan
- d. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Bambang Suyono, S.Hut, MM)
 - Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Seksi Pengendalian Perubahan Iklim
- e. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat (Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si / PLT)
 - Seksi Penyuluhan
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Hutan Adat dan Kemitraan
- f. UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (Era Sulastri, S.Hut, M.Si)
 - Subbagian Tata Usaha
 - Seksi Pengembangan Sumber Benih
 - Seksi Informasi dan Peredaran Benih

- g. UPTD KPHL Bukit Barisan (Kusworo, SP, M.Si)
- Subbagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
- h. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pasaman Raya (Terra Dharma, S.Hut, M.Si)
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
- i. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Limapuluh Kota (Boy Martin, S.H, M.Si)
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
- j. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Agam Raya (Cucu Sukarna, S.Ip)
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
 -
- k. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Sijunjung (Yandesman, S.Hut)
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
- l. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Solok (Ir. Refriasel)
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
- m. UPTD Kesatuan Pengelola Hulu Batanghari (Hasan, S.Hut)
- Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

- n. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Dharmasraya (Hendra Bakti Putra, S.T)
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

- o. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Pesisir Selatan/KPHP (Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si)
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

- p. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Mentawai/KPHP (Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si)
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 903/100/Sekr-2022 Tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana telah dirubah terakhir sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 903/2776/Sekr-2022 Tanggal 12 Oktober 2022 tentang Perubahan Kelima Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun pembangunan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu Pelayanan, Pengawasan dan Regulasi sebagaimana tercantum dalam kewenangan di bidang Kehutanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai
Secara keseluruhan personil yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah 365 orang yang terdiri dari :
 - 358 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil
 - 4 Orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - 3 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap

- b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
 - S3 : 0 orang
 - S2 : 34 orang
 - S1 : 175 orang
 - D4 : 6 orang
 - D3 : 29 orang
 - D1 : 1 orang
 - SLTA : 98 orang
 - SLTP : 4 orang
 - SD : 1 orang
 - Jumlah : 362 orang

- c. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - Golongan IV : 41 orang
 - Golongan III : 267 orang
 - Golongan II : 49 orang
 - Golongan I : 2 orang

- d. Jumlah Pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
 - Pejabat Struktural
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 14 orang
 - Eselon IV : 34 orang
 - Fungsional Tertentu: 154 orang
 - Fungsional Umum : 159 orang

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 (Audited) telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna dalam arti belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

